



PERUBAHAN

Rencana Strategis 2021 - 2026

Kecamatan Pasimasunggu



KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

TAHUN 2023

Kata Pengantar

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Allah S.W.T yang telah memberi rahmat karunia-Nya atas terselesaikannya Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026 adalah sebagai implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Pasimasunggu ini berpedoman kepada Surat Edaran Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Perubahan Rencana Strategi Kecamatan Pasimasunggu pada hakikatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat incremental (senantiasa meningkat dan terus menerus) dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan.

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Pasimasunggu ini, semoga menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi pegawai Kecamatan Pasimasunggu di dalam melaksanakan tugas Pokok dan Fungsinya. Amin.

Pasimasunggu, Agustus 2023

Camat Pasimasunggu,



NER MAWING, S.Sos., M.Si
Np. 196611021991111002

Daftar Isi

Halaman Judul	
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. 1. Latar Belakang	1
1. 2. Landasan Hukum.....	3
1. 3. Maksud dan Tujuan	9
1. 1. 1. Maksud.....	9
1. 1. 2. Tujuan	9
1. 4. Sistematika Penulisan	10
BAB II GAMBARAN DAN PELAYANAN	13
2. 1. Tugas, Fungsi dan Strukur Organisasi.....	13
2. 2. Sumber Daya.....	28
2. 3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Pasimasunggu	30
2. 4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	36
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	40
3. 1. Identitas Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Pasimasunggu	40

3. 2. Telaah Program Bupati Kepulauan Selayar Terpilih 2021 – 2026.....	45
3. 3. Telaah Renstra K/L dan Renstra.....	49
3. 4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian lingkungan Strategis Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.	56
3. 5. Penentuan Isu-Isu Stategis	57
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	61
4. 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Pasimasunggu .	61
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	66
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ...	72
BAB VII KINERJA	134
BAB V PENUTUP	138

Daftar Tabel

- Tabel 2.1. Data PNS Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar Sesuai dengan Tingkat Pendidikan
- Tabel 2.2. Data PNS Menurut Golongan Ruang dan Tingkat Pendidikan Formal
- Tabel 2.3. Tabel Data asset
- Tabel 2.4. Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Pasimasunggu Tahun 2021-2026 (TC.23)
- Tabel 2.5. Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kantor Kecamatan Pasimasunggu tahun 2021-2026 (TC.24)
- Tabel 2.6. Tingkat Elektifikasi Kecamatan Pasimasunggu Tahun 2019
- Tabel 2.7. Banyaknya Sarana dan Prasarana Ekonomi Menurut Desa/Kelurahan dan Jenisnya di Kecamatan Pasimasunggu, 2019
- Tabel 3.1 Permasalahan pelayanan (TB.35)
- Tabel 3.2 Perkembangan Alokasi Anggaran Kecamatan Pasimasunggu
- Tabel 3.3 Identifikasi dan Permasalahan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Pasimasunggu
- Tabel 3.4 Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas (Tabel TB.36)
- Tabel 4.1. Tujuan, Sasaran dan Sasara Jangka Menengah Kecamatan Pasimasunggu
- Tabel 4.2. Perubahan Tujuan, Sasaran dan Sasara Jangka Menengah Kecamatan Pasimasunggu
- Tabel 5.1. Tujuan , Sasaran, Strategis, dan Kebijakan
- Tabel 5.2. Perubahan Tujuan , Sasaran, Strategis, dan Kebijakan
- Tabel. 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar

- Tabel. 6.2 Perubahan Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar
- Tabel. 6.3 Perubahan Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar Periode 2021-2026 Sesuai Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
- Tabel 7.1 Target Capaian Indikator Per Tahun

Daftar Gambar

- Gambar 1. Hubungan Renstra Kecamatan Pasimasunggu dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
- Gambar 2. Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Pasimasunggu



BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Perubahan Rencana strategi (Renstra) SKPD adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk dilaksanakan dan mengukur hasilnya melalui feedback yang sistematis.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). . Kebijakan tersebut juga mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah yang secara periode sesuai dengan tata cara rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 263 ayat (3) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai kerangka pendanaan bersifat indikatif, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Sebagai salah satu fungsi dari Perangkat Daerah, sebagaimana dalam Permendagri 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Kewilayahan, Kecamatan dituntut bersinergi dan berintegrasi dengan perangkat daerah lainnya dan demikian pula dengan elemen masyarakat madani dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunannya agar usulan kebutuhan terhadap berbagai akses kehidupan yang dijaring melalui proses partisipasi.

Rencana Strategis Kecamatan Pasimasunggu tahun 2021-2026 disusun yang selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Pasimasunggu didasarkan pada kondisi yang diinginkan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2026, sebagai penjabaran dari visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021 - 2026.

Lebih jauh, Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025 (pada periode keempat) dan RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2013 - 2023. Sementara itu, sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Nasional, RPJMD harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), disamping menelaah RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dan RTRW Provinsi Sulawesi Selatan, serta RPJMD dan RTRW kabupaten lain yang berdekatan, agar terdapat keharmonisan dan keselarasan pembangunan antar wilayah dalam bingkai arah pembangunan provinsi dan arah pembangunan Nasional, serta arah kebijakan dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.

Kesemua pendekatan tersebut sebagaimana telah diatur oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

1. 2. Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2026, disusun atas dasar:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Caca Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Manteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor113)
33. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Tambahan Lembar Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322)
34. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);

35. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028;
36. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 302).
37. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 01);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 1);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2013-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 28);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 47).

1. 3. Maksud dan Tujuan

1. 1. 1. Maksud

Rencana strategis / Restra Kecamatan Pasimasunggu Tahun 2021 – 2026 disusun dengan maksud, untuk :

- a. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan oleh perangkat daerah yang akan dilaksanakan 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka pencapaian visi misi Pemerintah Daerah Kepulauan Selayar sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021 – 2026
- b. Sebagai acuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah

1. 1. 2. Tujuan

- a. Merumuskan arah kebijakan dasar dan strategi pembangunan yang dapat mendorong peran aktif seluruh elemen masyarakat di dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera;
- b. Merumuskan instrumen dan komitmen kebijakan anggaran jangka menengah yang dapat mengikat eksekutif dan legislatif;
- c. Merumuskan kerangka strategi dan program jangka menengah yang mengandung sasaran, outcome dan output yang spesifik dan memiliki target terukur supaya memudahkan di dalam menilai kinerja organisasi;
- d. Merumuskan kebijakan, strategi dan program pembangunan yang dapat mensinergikan sumber daya atau potensi yang dimiliki dengan peluang pengembangan wilayah untuk mewujudkan tujuan akhir yang ingin dicapai;
- e. Mengintegrasikan berbagai produk dokumen (contoh: RT, RW, Dokumen Potensi Daerah yang ada di desa, dll) ke dalam sebuah rencana strategis;

- f. Merumuskan sebuah dokumen rencana strategis yang dapat dijadikan acuan untuk proses koordinasi antar program & kegiatan yang dilakukan oleh Kecamatan Pasimasunggu supaya tercipta sinergi untuk pencapaian tujuan akhir yang diinginkan;
- g. Merumuskan dokumen rencana strategis yang dapat mengintegrasikan berbagai kepentingan secara vertikal dan horizontal;
- h. Meletakkan fondasi dan fokus tujuan pembangunan yang hendak dicapai;
- i. Mengarahkan program dan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh elemen organisasi untuk pencapaian visi dan misi organisasi;
- j. Memudahkan di dalam mengkomunikasikan dan mensosialisasikan ke seluruh elemen internal maupun external organisasi untuk meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk mencapai tujuan akhir organisasi.

Selain itu Renstra ini juga sebagai sarana untuk menampung aspirasi masyarakat dan untuk menentukan arah program kegiatan Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.

1. 4. Sistematika Penulisan

Keseluruhan materi Renstra ini disusun dan termuat dalam 7 Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam Bab ini diuraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PASIMASUNGGU

Memuat struktur organisasi dan memberikan informasi tentang peran (Tugas dan Fungsi) Kecamatan Pasimasunggu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas, apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Kecamatan Pasimasunggu periode sebelumnya, mengemukakan, capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Kecamatan Pasimasunggu ini.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN PASIMASUNGGU

Pada bab ini dikemukakan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Penentuan Isu-isu Strategis Kecamatan Pasimasunggu.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Pasimasunggu Tahun 2021 – 2026.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Pasimasunggu dalam 5 tahun mendatang. Demikian pula dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD Tahun 2021 - 2026.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dikemukakan indikator kinerja Kecamatan Pasimasunggu yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Pasimasunggu dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan Visi dan Misi BUpati dan Wakil Bupati periode 2021 - 2026.

BAB VIII

PENUTUP

Bab ini merupakan penutup disertai penjawabaran Renstra Perangkat Daerah lebih lanjut dalam bentuk Renja Perangkat Daerah



BAB II

GAMBARAN DAN PELAYANAN

Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, Kecamatan Pasimasunggu mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dengan tata kerja sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Sesuai dengan hal tersebut maka di bawah ini dijelaskan tugas dan fungsi serta struktur organisasi Kecamatan Pasimasunggu :

2. 1. Tugas, Fungsi dan Strukur Organisasi

A. CAMAT

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang urusan otonomi daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Untuk pelaksanaan tugasnya Camat mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang urusan otonomi daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang otonomi daerah;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang otonomi daerah;
4. Pelaksanaan administrasi Kecamatan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas Camat meliputi :

- menyusun rencana kegiatan Kecamatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
- mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;

- memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Kecamatan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- melaksanakan urusan pemerintahan umum;
- mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
- melaksanakan pembinaan di bidang mental dan keagamaan
- mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di Kecamatan;
- melaksanakan Tugas yang dilimpahkan oleh Bupati Dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;
- melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;

- menyusun laporan pelaksanaan Tugas Camat dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

B. SEKRETARIS

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi:

1. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Kecamatan;
2. Pengoordinasian penyusunan program, pelaporan dan hukum;
3. Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
4. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas Sekretaris meliputi:

- menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
- mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan program kerja;
- melaksanakan pembinaan organisasi dan tatalaksana;

- mengelola administrasi umum;
- melaksanakan pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- mengelola administrasi keuangan;
- melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh perangkat/aparatur kecamatan;
- melaksanakan dan evaluasi penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
- menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Camat membawahi Sub bagian yang terdiri dari :

1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga, mengelola administrasi kepegawaian serta pelaporan keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;

- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pemeliharaan dokumen kepegawaian;
- g. melakukan pelayanan teknis administrasi Kecamatan;
- h. melakukan pengelolaan surat-menyurat, kearsipan dan penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat;
- i. melakukan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris Kecamatan dan keprotokolan;
- j. memelihara kebersihan, keindahan dan ketertiban kantor;
- k. melakukan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- l. melakukan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- m. mengajukan pertimbangan hukum dalam lingkup kecamatan;
- n. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- o. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
- p. menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. melakukan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam

mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan serta mengelola administrasi keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas ;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Subbagian Program dan Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. melakukan penyiapan bahan dan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan Kecamatan tingkat Daerah;
- g. menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan kecamatan;
- h. menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor;
- i. menyusun rencana pelaksanaan dan perhitungan anggaran;
- j. melakukan verifikasi dan fasilitasi kebendaharaan;
- k. melakukan pengelolaan keuangan dan pemeliharaan dokumen keuangan kecamatan;
- l. melakukan pengelolaan, pengendalian, dan evaluasi penatausahaan keuangan Kecamatan;
- m. menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan yang meliputi realisasi anggaran bulanan, semesteran dan tahunan;
- n. menyusun neraca keuangan kecamatan;
- o. melakukan sistem informasi manajemen dan pelaporan Kecamatan;
- p. melakukan koordinasi, sinkronasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan Kecamatan;

- q. menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang Kecamatan;
- r. melakukan evaluasi pelaksanaan rencana dan program, pembangunan bidang Kecamatan;
- s. melakukan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Kecamatan;
- t. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- u. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
- v. menyusun laporan pelaksanaan Tugas Subbagian Program dan Keuangan serta memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- w. melakukan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. SEKSI TATA PEMERINTAHAN

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemerintahan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai Tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Tata Pemerintahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Tata Pemerintahan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

- e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. Memfasilitasi pembinaan ideologi negara, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- g. Melakukan pelayanan administrasi kependudukan, fasilitasi penyelenggaraan pertanahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
- h. Melakukan pembinaan Desa/Kelurahan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
- i. Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
- j. Melakukan inventarisasi asset atau kekayaan Pemerintah Desa/Kelurahan dan Pemerintah Daerah serta kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
- k. Menyiapkan rekomendasi dan perizinan tertentu;
- l. Melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- m. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

D. SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang ketenteraman dan ketertiban umum.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai Tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. Melakukan fasilitasi kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban;
- g. Melakukan fasilitasi sistem keamanan lingkungan;
- h. Melakukan koordinasi dan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja pada Kecamatan yang bersangkutan;
- i. Melakukan dan evaluasi penyelenggaraan urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
- j. Memfasilitasi penegakan Peraturan daerah bersama PPNS;
- k. Melakukan pengamanan kebijakan Peraturan daerah dalam bidang ketenteraman dan ketertiban;
- l. Menyiapkan rekomendasi dan perizinan tertentu;
- m. Melakukan pelayanan kebersihan, keindahan dan ketertiban;
- n. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

E. SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 75 Tahun 2016, Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan

bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang ekonomi dan pembangunan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai Tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Ekonomi dan Pembangunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Ekonomi dan Pembangunan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. Melakukan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan bidang perekonomian meliputi perindustrian dan perdagangan, koperasi, pengusaha kecil dan menengah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
- g. Melakukan fasilitasi bidang pertanian meliputi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
- h. Melakukan pendataan, evaluasi dan pelaporan statistik pertanian secara periodik;
- i. Melakukan pendataan obyek dan subyek pajak, retribusi serta pendataan lainnya sesuai dengan kebijakan Pemerintah daerah;
- j. Memfasilitasi pengawasan dan pengendalian bidang sumber daya alam meliputi perhutanan, kepariwisataan, pertambangan dan lingkungan hidup sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
- k. Menyiapkan rekomendasi perijinan tertentu;
- l. Memfasilitasi pengembangan perekonomian Desa/Kelurahan;
- m. Melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan perekonomian;

- n. Memantau pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan kebijakan Pemerintah daerah;
- o. Memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa/Kelurahan;
- p. Memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan pengembangan sumber daya air, pengembangan prasarana jalan jembatan dan pengembangan perumahan, pemukiman dan perkotaan sesuai dengan rencana tata ruang;
- q. Memantau dan pengendalian kegiatan bidang pembangunan meliputi pengembangan sumber daya air, pengembangan prasarana jalan dan jembatan, pengembangan perumahan, pemukiman;
- r. Memfasilitasi pengelolaan bidang pengembangan sumber daya air, prasarana jalan, jembatan dan perumahan, pemukiman sesuai dengan rencana tata ruang;
- s. Mengumpulkan dan mengelola data dibidang pengembangan jalan dan jembatan, perumahan, pemukiman serta penyehatan lingkungan;
- t. Menyiapkan rekomendasi dan perizinan tertentu;
- u. Melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pembangunan;
- v. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- w. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

F. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang kesejahteraan social.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai Tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Kesejahteraan Sosial untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial;
- g. Melakukan pembinaan dibidang mental dan keagamaan;
- h. Mengoordinasikan kegiatan dibidang rehabilitasi kesejahteraan sosial, bantuan sosial dan perlindungan sosial serta pengembangan dan pemberdayaan sosial;
- i. Mengoordinasikan pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
- j. Melakukan dan evaluasi penyelenggaraan urusan kesejahteraan sosial;
- k. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- l. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

G. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

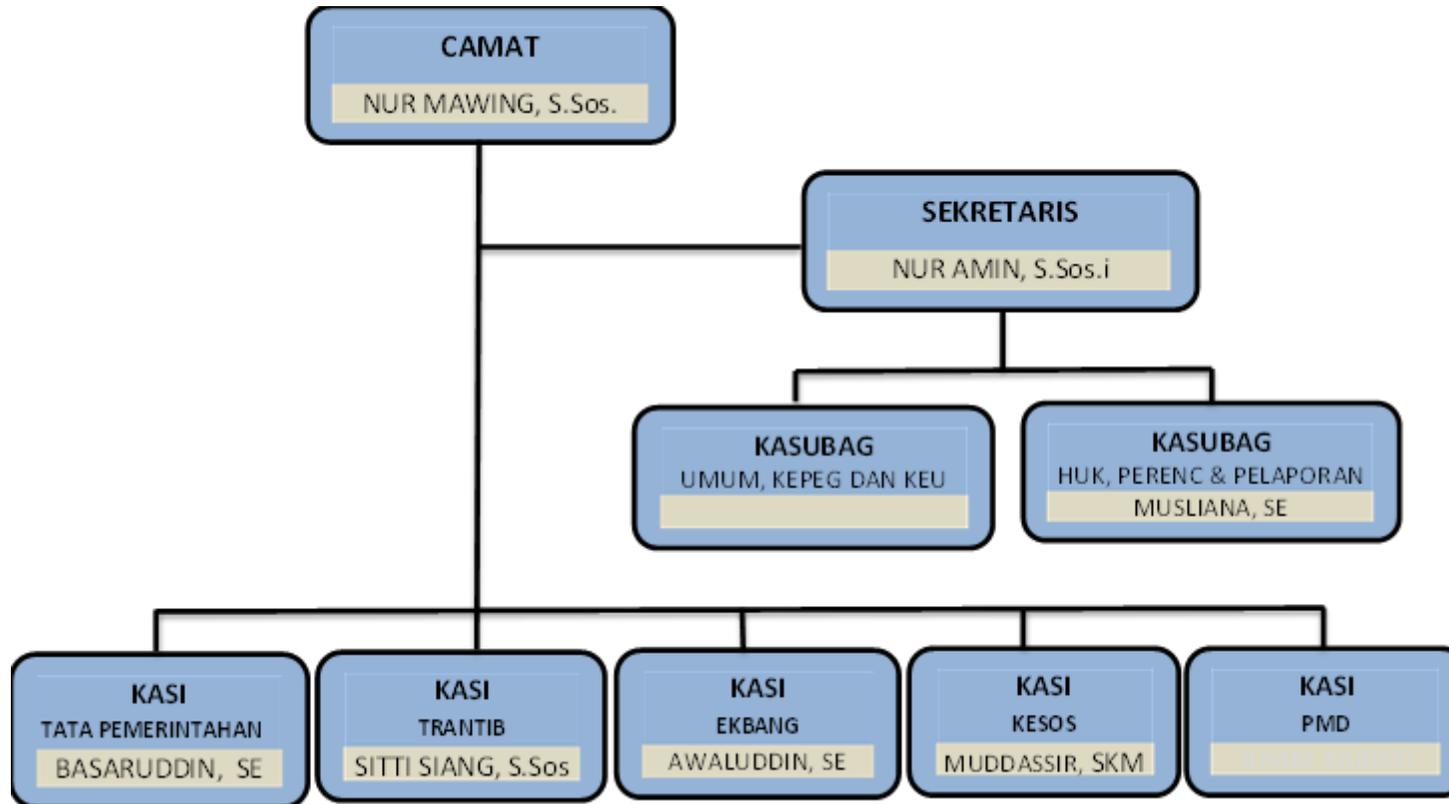
Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat desa.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. Melakukan fasilitasi pemberdayaan masyarakat meliputi fasilitasi pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pengembangan masyarakat Desa sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
- g. Melakukan fasilitasi dan pelayanan kesejahteraan sosial meliputi fasilitasi sosial, ketenagakerjaan, transmigrasi, pendidikan, kesehatan, keluarga berencana dan kehidupan keagamaan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
- h. Menginventarisasikan dan memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan masalah sosial;
- i. Memfasilitasi pembinaan generasi muda, olahraga dan seni budaya;
- j. Melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat;
- k. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- l. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya



STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 2 Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Pasimasunggu

Fungsi Kecamatan

1. Pelaksanaan perencanaan dan perumusan bahan kebijakan program kerja bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pembangunan, Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial;
2. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, penganalisisan data dibidang Pemerintahan, ketenteraman dan Ketertiban Umum, pembangunan, pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial;
3. Penyelenggaraan kegiatan perumusan, ketentraman dan Ketertiban Umum, pembangunan, pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial;
4. Pelaksanaan Inventarisasi Aset Desa atau Kekayaan Desa lainnya yang ada di Wilayah Kecamatan serta pemeliharaan dan pengelolaan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
5. Pelaksanaan pertimbangan pengangkatan Kepala Kelurahan;
6. Pelaksanaan peningkatan usaha-usaha pengembangan ekonomi Desa dan Kelurahan;
7. Pelaksanaan ketatausahaan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
8. Pelaksanaan pemberian rekomendasi/perizinan kewenangan dibidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pembangunan, Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan kewenangannya;
9. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
10. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait dengan kegiatan Pemerintahan Kecamatan;

2. 2. Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

Data PNS Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai dengan tingkat pendidikan, secara terperinci sebagai berikut :

No	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH		PROSENTASE	
		PNS	CPNS	PNS	CPNS
1	S2	2	0	13,33%	0
2	S1	5	0	33,33 %	0
3	D3	0	0	0	0
4	SLTA	8	0	53,33 %	0
5	STP	0	0	0	0
6	SD	0	0	0	0
		15	0	100 %	0

Tabel 2.1. Data PNS Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar Sesuai dengan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan PNS di kecamatan pasimasunggu di dominasi oleh SLTA sebanyak 8 orang Strata Dua 2 orang dan Strata Satu sebanyak 5 orang.

No	Gol. Ruang	Tingkat Pendidikan Formal (orang)								JML
		S2	S1	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	
1	IV/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	IV/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	IV/a	1	-	-	-	-	-	-	-	1
4	III/d	1	3	-	-	-	-	-	-	4
5	III/c	-	1	-	-	-	1	-	-	2
6	III/b	--	1	-	-	-	-	-	-	1
7	III/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	II/d	-	-	-	-	-	3	-	-	3
9	II/c	-	-	-	-	-	3	-	-	3

10	II/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	II/a	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Jumlah		2	5	-	-	-	8	-	-	15

Tabel 2.2. Data PNS Menurut Golongan Ruang dan Tingkat Pendidikan Formal

Tingkat Pendidikan terbagi dalam beberapa golongan dimulai dari Golongan II/a hingga Golongan IV/a

b. Asset/Modal

Keberadaan sarana dan peralatan kerja sangat mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi. Sarana dan Peralatan Kerja Utama di Kecamatan Pasimasunggu meliputi gedung kantor dan perlengkapannya.

Adapun sarana dan prasarana yang tersedia di Kecamatan Pasimasunggu disajikan dalam bentuk inventaris barang sesuai Permendagri No 17 TH 2007 antara lain :

No	Uraian	Keadaan			Jumlah	Keterangan
		B	RR	RB		
1	Tanah Lokasi Perkantoran				1 Unit	Kantor dan rumah dinas
2	Kendaraan roda 2 (Motor)	2	4		6 Unit	Kantor Camat dan sekretariat Kecamatan
3	Kendaraan Roda 4 (Mobil)	1			1 Unit	Sekretariat Kecamatan di Benteng Selayar
4	Perkakas Bengkel Lain				-	
5	Brand Kas				-	
6	Alat Kantor Lainnya				1	
7	Lemari Kayu				2	
8	Meja Rapat	2			2	
9	Meja Makan				1	
10	Kursi Putar	5	1	2	8	
11	Meja Komputer	1	-	-	1	
12	Rak Buku	2	-	-	2	
13	Kursi Plastik			50	150	
14	Papan Pengumuman	1	-	-	1	
14	Kursi Kerja				33	
15	Gordyn				1	
16	Jam Mekanis				-	
17	Ac Unit				-	

18	Kipas Angin	6	-	-	6	
19	Kompor Gas	2	-	-	2	
20	Alat Dapur Lainnya				1	
21	Tabung Gas	2	-	-	2	
22	Televisi	1	-	1	2	
23	Mimbar/Podium	1	-	-	1	
24	P.c. Unit Komputer Fc	1	-	1	2	
24	Laptop	2	1	1	4	
25	Printer	1	1		2	
26	Scanner				-	
27	Meja Kerja				10	
28	Lemari Arsip				7	
29	Camera Elektronik	1	-	-	1	
30	Mkicrophone	1	-	-	1	
31	Sound System				4	
32	Tenda Terowongan	6	-	-	6	
33	Tondon Air	1	-	-	1	
34	CCTV				-	

Tabel 2.3. Tabel Data asset

2. 3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Pasimasunggu

Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat trend yang terjadi selama kurun waktu 5 tahun yang lalu. Dengan mengamati kecenderungannya yang terjadi selama 5 tahun ke belakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 tahun ke depan. Setelah mengetahui trend tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Pasimasunggu berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan Nomor 09 Tahun 2007, berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Pasimasunggu periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Kecamatan Pasimasunggu dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Bahan penulisan tentang kinerja pelayanan Kecamatan Pasimasunggu ini mengacu pada hasil kerja .

Tabel 2.4. Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Pasimasunggu Tahun 2021-2026 (TC.23)

No	Indikator Kinerja sesuai Tupoksi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya	Terget Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan aparatur pemerintah dan lembaga kemasyarakatan dalam rangka reformasi birokrasi																		
	❖ Jumlah RW tertib administrasi				1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	100 %	100 %
	❖ Data dan materi lingkup pemerintahan yang tersusun (profil kecamatan dan tipologi)				1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1	1	1	1	1	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	❖ Pembinaan Desa (Desa terbaik)				1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	0	0	0	1	1	0	0	0	100 %	100 %
	❖ SOP bidang pemerintahan yang tersusun				1 SOP	1 SOP	1 SOP	1 SOP	1 SOP	1	1	1	1	1	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Meningkatkan kapasitas organisasi melalui pengembangan budaya kerja dan menerapkan system manajemen kinerja																		
	❖ SOP bidang administrasi umum , kepegawaian, program dan pengelolaan keuangan				1 SOP	1 SOP	1 SOP	1 SOP	1 SOP	1	1	1	1	1	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	❖ Analisis Tupoksi, analisis beban kerja, dan analisis jabatan tersusun				3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3	3	3	3	3	100 %	100 %	100 %	100 %	30%
	❖ % PNS yang mendapat hukuman disiplin				0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	❖ Rata-rata tingkat kehairan PNS dalam setahun				90 %	80 %	90 %	95 %	95 %	80 %	80 %	80 %	85 %	85 %	88.8 9 %	100 %	88.8 9 %	89.4 7 %	89.4 7 %
3	Meingkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan umum terdapat masyarakat																		
	❖ % wajib KTP yang memiliki KTP				90 %	91 %	92 %	93 %	94 %	90	90	90	90	90 %	100	98.9	97.8	96.7	95.7

										%	%	%	%		%	0 %	3 %	7 %	4 %	
	❖ Indeks kualitas masyarakat																			-
	❖ Jumlah SOP bidang pelayanan masyarakat yang tersusun				1 SOP	1 SOP	1 SOP	1 SOP	1 SOP	1	1	1	1	1	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
4	Meningkatkan kualitas kehidupan kemasyarakatan melalui kemudahan akses terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat serta meningkatkan kerukunan beragama dan kebangsaan masyarakat																			
	❖ Terbinanya kader POSYANDU dan PKK				2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2	2	2	2	2	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
	❖ % sekolah yang menerapkan UKS				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
	❖ Jumlah insiden akibat konflik agama				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
	❖ Jumlah rumah ibadah yang berfasilitas mendapat bantuan				6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
	❖ SOP lingkup pendidikan yang tersusun				-	-	-	-	-										100 %	
5	Meningkatkan aktifitas UKM, produk unggulan kecamatan, koperasi, dan BKM binaan																			
	❖ Jumlah UKM yang aktif				3 unit	-3 unit	-3 unit	1 unit	3 unit	0	0	0	1	2	0	0	0	100 %	66.6 %	
	❖ Jumlah Koperasi aktif				2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	❖ SOP bidang EKBANG tersusun				1 SOP	1 SOP	1 SOP	1 SOP	1 SOP										100 %	
	❖ Jumlah program kemitraan yang terjalin				1 prog	1 prog	1 prog	1 prog	1 prog	0	0	0	1	1	0	0	0	100 %	100 %	
6	Meningkatkan kualitas lingkungan melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kualitas air, udara, dan tanah, dan pengelolaan sampah dengan 3 R (reduce, Reuse, Recycle)																			
	❖ Jumlah pohon yang ditanam di																			

	kecamatan																		
	❖ Jumlah kawasan konservasi laut kecamatan (KKLK) yang dikelola																		
	❖ SOP bidang lingkungan hidup yang tersusun				1 SOP	1	1	1	1	1	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %				
7	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan budaya tertib dan aman dalam kehidupan bermasyarakat																		
	❖ % penurunan pelanggaran K3				20 %	20 %	10 %	10 %	10 %	20	20	10	10	10	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	❖ % penurunan illegal logging				80 %	85 %	90 %	90 %	90 %	80	85	90	90	90	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	❖ % penurunan illegal fishing				30 %	30 %	20 %	20 %	20 %	20	20	10	10	10	66.6 %	66.6 %	50 %	50 %	50 %
	❖ SOP bidang ketentraman dan ketertiban umum yang tersusun				1 SOP	1	1	1	1	1	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %				

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan aparatur pemerintah dan lembaga kemasyarakatan dalam rangka reformasi birokrasi, kecamatan pasimasunggu tidak menemukan kesenjangan dalam pelayanan yang signifikan, namun dalam merealisasikan jumlah RW tertib administrasi yang telah ditargetkan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 baru dapat direalisasikan pada tahun 2019 dan 2020.

Meningkatkan kapasitas organisasi melalui pengembangan budaya kerja dan menerapkan system manajemen kinerja tidak terdapat kesenjangan sehingga mayoritas target telah terealisasi. Terdapat peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan umum terdapat masyarakat dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020

Kualitas kehidupan kemasyarakatan melalui kemudahan akses terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat serta meningkatkan kerukunan beragama dan kebangsaan masyarakat tidak terdapat kesenjangan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020

Kualitas lingkungan melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kualitas air, udara, dan tanah, dan pengelolaan sampah dengan 3 R (reduce, Reuse, Recycle) hanya terlaksana pembuatan SOP.

Kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan budaya tertib dan aman dalam kehidupan bermasyarakat dapat terlaksana dari tahun ke tahun tanpa adanya kesenjangan.

Tabel 2.5. Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kantor Kecamatan Pasimasunggu tahun 2021-2026 (TC.24)

Uraian	Anggaran Tahun ke- (000)					Realisasi Anggaran Tahun ke- (000)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Belanja Daerah																	
1. Belanja Tidak Langsung																	
a. Belanja Pegawai	5.650.100	5.655.100	6.273.900	5.418.553	1.821.700	5.306.852	5.275.828	5.897.705	5.306.335	1.669.826	93,92	93,29	94,00	97,93	91,66	-20%	-21%
b. Belanja Hibah																	
2. Belanja Langsung																	
a. Belanja Pegawai																	
b. Belanja barang dan Jasa	763.000	800.000	558.760	569.708	418.301	758.739	794.408	551.010	564.541	415.488	99,44	99,30	98,61	99,09	99,33	-11%	-11%
c. Belanja Modal	30.000	150.000	10.000	37.500	15.000	30.000	143.148	10.000	37.500	15.000	100	95,43	100	100	100	-13%	-13%

Terjadi dinamika proyeksi penganggaran dari tahun ketahun dan tidak terdapat pertumbuhan yang signifikan dalam pelaksanaannya.

2. 4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

1. Tantangan

Berdasarkan analisis lingkungan strategis, dapat diuraikan beberapa tantangan yang dihadapi Kecamatan Pasimasunggu dalam penyelenggaraan pemerintah, melaksanakan pembangunan, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, antara lain :

a. Insfrastruktur Kelistrikan Yang Belum Memadai

Pemenuhan energy listrik bagi kebutuhan rumah tangga di Kecamatan Pasimasunggu sudah dilalukan melalui listrik yang disediakan pemerintah namum daya yang masih terbatas jangkauan dan waktu nyalanya. Tingkat eletrivikasi di Kecamatan Pasimasunggu masih rendah pada posisi 28,72% dari jumlah rumah tangga yang ada.

KLHS : Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Desa/Kelurahan	Pegguna Listrik			Bukan Pengguna Listrik
	PLN	Non PLN	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Kembangragi	734	-	734	-
2. Ma'minasa	-	237	237	-
3. Tanamalala	-	245	245	-
4. Labuang Pamajang	370	-	370	-
5. Bontosaile	-	232	232	-
6. Massungke	-	285	285	-
7. Telukkampe	-	312	312	-
Pasimasunggu	1.104	1.311	2.415	-

Tabel 2.6. Tingkat Eletivikasi Kecamatan Pasimasunggu Tahun 2019

a. Terbatasnya Pelayanan Sarana Transportasi Antar Pulau

Sebagai kecamatan yang terdiri dari wilayah kepulauan dengan jumlah pulau sebanyak 8 buah pulau, ketersediaan sarana transportasi antar pulau merupakan suatu keniscayaan. Selama ini, sebagai akibat terbatasnya sarana transportasi antar pulau, khususnya dari dan ke ibukota kabupaten, menyebabkan apar pemerintah yang bertugas di Kecamatan Pasimasunggu namun berdomisili dari daratan Selayar terkadang mengakibatkan lalai menjalankan tugasnya.

Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan pelayanan pemerintah dan pembangunan serta kemasyarakatan di Kecamatan Pasimasunggu, perlu ditingkatkan ketersediaan sarana transportasi dari pulau guna mendukung aksesibilitas arus barang, jasa dan penumpang dari dan ke wilayah Kecamatan Pasimasunggu.

b. Sistem Pertanian Masyarakat Yang Masih Relative Bersifat Subsistem

Kegiatan perekonomian yang berbasis hanya pada pemenuhan kebutuhan keluarga mendominasi kegiatan pertanian di Pasimasunggu. Hal ini berimbas pada pertanian yang menggerakkan perekonomian Kecamatan Pasimasunggu secara umum. Hal ini dimungkinkan karena keterbatasan transportasi untuk pemasaran hasil pertanian. Moda transportasi yang ada dengan moda transportasi rakyat yang relative tradisional dengan biaya ekonomi yang relatif mahal berimbas langsung pada pendapatan masyarakat dengan margin keuntungan yang juga relative kecil.

c. Kualitas Ketenagakerjaan Yang Relative Rendah

Keterbatasan lapangan kerja yang tersedia dan tingkat pendidikan pencari kerja yang berbanding lurus dengan kualitas tenaga kerja yang rendah. Hal ini juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang relative rendah. Juga dipengaruhi oleh tingkat ekonomi yang masih relative rendah.

d. Pengelolaan Potensi Sumberdaya Alam Baik Darat Maupun Laut Belum Optimal

Sebagai kecamatan dengan wilayah kepulauan dimana perairan menjadi dominan dengan potensi yang sangat besar. Kekurangan armada penangkapan ikan yang itupun yang ada masih bersifat tradisonal ditambah lagi jangkauan pemasaran dengan armada pengangkutan hasil perikanan yang terbatas meyebabkan potensi perikanan dan kelautan menjadi hal yang kurang menarik bagi masyarakat Kecamatan Pasimasunggu.

Potensi pertanianpun yang merupakan potensi sumberdaya alam di darat juga tidak optimal dalam pengelolaannya. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa transportasi dan pengelolaan subsistem yang hanya menjadikan pertanian untuk kebutuhan pemenuhan keluarga saja.

Desa		kelompok Pertokoan	Pasar dengan Bangunan Permanen	Pasar dengan Bangunan Semi	Pasar Tanpa Bangunan
1		2	3	4	5
1	Kembangragi	-	1	-	-
2	Ma'minasa	-	1	-	-
3	Tanamalala	-	-	-	-
4	Labuang Pamajang	-	-	-	-
5	Bontosaille	-	-	-	-
6	Massungke	-	-	-	-
7.	Telukkampe				
Pasimasunggu		-	2	-	-

Tabel 2.7. Banyaknya Sarana dan Prasarana Ekonomi Menurut Desa/Kelurahan dan Jenisnya di Kecamatan Pasimasunggu, 2019

2. Peluang

Sebagaimana disetiap tantangan maka akan ada peluang yang bisa menjadi potensi pengembangan, berikut adalah potensi yang dapat dikembangkan menjadi peluang yang dimiliki Kecamatan Pasimasunggu :

- a. Potensi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan yang masih melimpah dengan nilai jual yang baik di pasar global. Untuk produk perkebunan, kopra memiliki peluang yang sangat baik, hal ini dibuktikan dengan harga kopra yang berasal dari Pasimasunggu mendapat harga yang tertinggi di pedagang besar Ibukota Kabupaten. Demikian pula dengan jambu mente.
- b. Tersedia SDM ketenagakerjaan khususnya tenaga kerja yang menggunakan aktifitas fisik yang kuat yang cukup tersedia.
- c. Letak wilayah di tenggara yang berbatas langsung dengan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, hal ini bisa dikembangkan menjadi gerbang perdagangan barang dan jasa.
- d. Terdapat beberapa pulau dengan potensi kepariwisataan yang sangat potensial untuk dikembangkan baik secara local maupun global. Potensi keindahan pulau kecil yang dapat dikembangkan untuk paket pariwisata, factor kedekatan perairannya dengan Bali dan Lombok dapat dimanfaatkan secara optimal.
- e. Komitmen Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2021 - 2026 yang akan menjadikan wilayah laut sebagai basis potensi ekonomi daerah dimana dalam area poros maritim letak Kepulauan Selayar yang berada di pertengahan wilayah Republik Indonesia, dapat dikembangkan menjadi pusat distribusi barang ke wilayah timur Indonesia.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3. 1. Identitas Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Pasimasunggu

Kecamatan Pasimasunggu yang merupakan kecamatan kepulauan dengan wilayah perairan yang cukup luas dimana terdapat 1 desa yang terletak di 1 pulau yang terpisah dengan kondisi perairan yang sangat tergantung pada kondisi cuaca, dimana hal ini menjadi kendala yang cukup berarti ditambah dengan kendala telekomunikasi yang tidak tercakup sinyal GSM. Pemerintah Kecamatan Pasimasunggu menyadari bahwa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi terutama dalam hal optimalisasi pelayanan kepada masyarakat membutuhkan upaya yang maksimal dan sungguh-sungguh agar pelayanan yang diberikan tersebut dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat secara menyeluruh dengan kualitas pelayanan prima yang optimal.

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Masih lemahnya koordinasi dengan Desa/Kelurahan tentang Kebijakan Pemerintah Daerah	Kebijakan dan arah pembangunan Pemerintah Daerah yang belum tersampaikan dengan baik dan belum dipahami secara mendasar	Desa tidak bertanggung-jawab secara langsung ke Camat
			Belum maksimal koordinasi dalam bentuk rapat yang membahas arah kebijakan pembangunan daerah.
		Penyelenggaraan pemerintahan yang belum optimal	Lemahnya integritas dan profesionalitas aparatur

			Kurangnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
			Keterbatasan kewenangan dan anggaran yang limpahkan/diberikan
2	Terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor kecamatan Desa dan kelurahan sehingga pelayanan kepada masyarakat belum maksimal	keterbatasan anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana untuk kebutuhan peningkatan pelayanan masyarakat	Keterbatasan jumlah pegawai untuk memenuhi rasio pelayanan yang ideal
			Saran pelayanan yang belum optimal dan cenderung masih masih konvensional sehingga memerlukan waktu pelayanan yang lebih lama
3	Belum Optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah	Tingkat pendidikan dan ekonomi	Pembangunan yang masih menjadikan masyarakat sebagai obyek (fisik) yang seharusnya perimbangan sebagai subyek (pemberdayaan) yang ideal
		Optimalisasi bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat dimana - Belum optimalnya ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan.	Hasil pebangunann yang belum bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk membangun keberdayaan masyarakat untuk meningkatkan tingkat sosial dan ekonomi
			Data yang belum sempurna dan terkesan seadanya dan terkesan keperpihakan dalam penyaluran dan pemanfaatan bantuan yang disalurkan.
			Belum optimalnya penyaluran rastra, PKH, bantuan keagamaan kepada masyarakat desa
			Sosialisasi bahwa tidak sepatasnya terus-menerus merima bantuan.
		Usulan masyarakat yang masuk dalam APBD dan Musrenbang Kabupaten yang belum terakomodir dengan seksama	Masih rendahnya tingkat kehadiran masyarakat dalam Musrenbang desa dan kecamatan
			Tingkat keterserapan usulan yang prioritas di desa ke dalam prioritas anggaran kegiatan
4	Lambatnya peranan fungsi kelembagaan di masyarakat akibat kurang koordinasi masyarakat dan	Peran Lembaga Kemasyarakatan yang belum dipandang sebagai suatu institusi penting	Pembinaan secara berkelanjutan yang masih sangat perlu ditingkatkan

	pemerintah Desa/kelurahan dan kecamatan		Keberadaan lembaga masih berupa serimonial pelengkap hanya saat ada kepentingan sesaat saja
--	---	--	--

Disimpulkan beberapa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Pasimasunggu dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kecamatan Pasimasunggu. Peta kendala-kendala tersebut, sebagai berikut :

1. Sumber daya Aparatur sebagai instrument utama pelayanan masyarakat relative belum tersedia memadai.

Sebagaimana yang dipaparkan secara umum di Bab sebelumnya perihal gambaran pelayanan Kecamatan Pasimasunggu, bahwa ketersediaan SDM Aparatur yang tidak memadai. Dengan kondisi geografis kepulauan dengan jumlah penduduk sebanyak 8.719 jiwa, 2.241 KK tentunya membutuhkan presentase ketersediaan SDM Aparatur yang ideal.

Kondisi SDM Aparatur di Kantor Kecamatan Pasimasunggu saat ini sebanyak 18 PNS dan 15 PTT dengan beban tugas yang cukup berat menjadi permasalahan tersendiri dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan dan pelayanan kemasyarakatan di Kecamatan Pasimasunggu.

2. Kualitas koordinasi lintas sektor instansi pemerintah yang relatif kurang

Dampak dari keterbatasan ketersediaan SDM Aparatur Pemerintah di Kecamatan Pasimasunggu adalah pada kualitas koordinasi antar sektor pemerintah yang relative kurang. Hal ini tercermin dari kinerja beberapa urusan pemerintah yang tidak optimal, antara lain : pendidikan, kesehatan, energy dan sumber mineral, kelautan dan perikanan, pertanian, perhubungan, terutama pada subsektor telekomunikasi yang sangat terbatas jika dibandingkan

dengan kecamatan di wilayah perairan apalagi jika dibandingkan dengan kecamatan di daratan pulau utama.

3. Alokasi anggaran yang belum ideal

Dibandingkan dengan beban tugas dan luas wilayah kerja yang ada di Kecamatan Pasimasunggu, alokasi anggaran yang selama ini dikelola Kecamatan Pasimasunggu relatif tidak ideal.

Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut :

Tahun	Alokasi Anggaran	%
2015	911,669,500	99.85%
2016	793,800,000	99.46%
2017	950,000,000	98.69%
2018	666,560,000	89.75%
2019	607,208,000	99.15%
2020	569.688,296	99.51%

4. Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan yang masih relatif kecil

Penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan dapat dapat berdayaguna dan berhasilguna, apabila mendapat dukungan dan partisipasi aktif dan segenap komponen lapisan masyarakat.

Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi terhadap tingkat kesadaran masyarakat dalam memberikan partisipasinya pada setiap kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Pasimasunggu, dapat disimpulkan bahwa kesadaran partisipatif masyarakat masih relative rendah. Hal ini disebabkan antara lain : tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, dan beban ekonomi yang dihadapi masyarakat dirasakan cukup berat, sehingga untuk meluangkan waktu dalam rangka terlibat dalam berbagai aktifitas kegiatan pemerintahan dan pembangunan sangat sulit.

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interperstasi: Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan aparatur pemerintah dan lembaga kemasyarakatan dalam rangka reformasi birokrasi			
	❖ Jumlah RW tertib administrasi	=	Target RW hanya 1	Pembinaan yang berkelanjutan dan terfokus
	❖ Data dan materi lingkup pemerintahan yang tersusun (profil kecamatan dan tipologi)	=		Data profil yang sudah tersedia sebelumnya
	❖ Pembinaan Desa (Desa terbaik)	= (40 rasio 5 thn)		
	❖ SOP bidang pemerintahan yang tersusun			SOP yang sudah tersedia sebelumnya
2	Meningkatkan kapasitas organisasi melalui pengembangan budaya kerja dan menerapkan system manajemen kinerja			
	❖ SOP bidang administrasi umum, kepegawaian, program dan pengelolaan keuangan	=		SOP yang sudah tersedia sebelumnya
	❖ Analisis Tupoksi, analisis beban kerja, dan analisis jabatan tersusun	=		Dokumen yang sudah tersedia sebelumnya
	❖ % PNS yang mendapat hukuman disiplin	=		Pembinaan dilakukan dengan cara humanis dan konstruktif
	❖ Rata-rata tingkat kehairan PNS dalam setahun	89.47		Pembinaan dilakukan dengan cara humanis dan konstruktif
3	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan umum terdapat masyarakat			
	❖ % wajib KTP yang memiliki KTP	95.74	Jarak ke dinas teknis	Sosialisasi berkelanjutan dari aparatur desa
	❖ Indeks kualitas masyarakat			
	❖ Jumlah SOP bidang pelayanan masyarakat yang tersusun	=		SOP yang sudah tersedia sebelumnya
4	Meningkatkan kualitas kehidupan kemasyarakatan melalui kemudahan akses terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat serta meningkatkan kerukunan beragama dan kebangsaan masyarakat			
	❖ Terbinanya kader POSYANDU dan PKK	=		Sosialisasi berkelanjutan dari aparatur desa dan petugas Posyandu
	❖ % sekolah yang menerapkan UKS	=		Menjadi prioritas di sekolah
	❖ Jumlah insiden akibat konflik agama	=		Sosialisasi berkelanjutan dari semua pihak yang berkepentingan
	❖ Jumlah rumah ibadah yang berfasilitas mendapat bantuan	=	Ketersediaan pendanaan	Sosialisasi berkelanjutan dari aparatur desa
	❖ SOP lingkup pendidikan yang tersusun			
5	Meningkatkan aktifitas UKM, produk unggulan kecamatan, koperasi, dan BKM binaan			
	❖ Jumlah UKM yang aktif	66.66	Kegiatan pelatihan yagn	Potensi sumber daya alam

		(33.34 ratio 5 thn)	sangat terbatas	yang tersedia
	❖ Jumlah Koperasi aktif	0		
	❖ SOP bidang EKBANG tersusun	=		SOP yang sudah tersedia sebelumnya
	❖ Jumlah program kemitraan yang terjalin	= (40 ratio 5 thn)	Akses informasi terbatas karena keterbatasan jarak	Dukungan pemerintah desa dalam membangun UKM di desanya
6	Meningkatkan kualitas lingkungan melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kualitas air, udara, dan tanah, dan pengelolaan sampah dengan 3 R (reduce, Reuse, Recycle)			
	❖ Jumlah pohon yang ditanam di kecamatan	0	Keterbatasan lahan	
	❖ Jumlah kawasan konservasi laut kecamatan (KKLK) yang terkelola	0	Keterbatasan lahan	
	❖ SOP bidang lingkungan hidup yang tersusun	=		SOP yang sudah tersedia sebelumnya
7	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan budaya tertib dan aman dalam kehidupan bermasyarakat			
	❖ % penurunan pelanggaran K3	=	Tingkat kesadaran hukum yang masih relatif kurang	Sosialisasi berkelanjutan dari pihak terkait
	❖ % penurunan illegal logging	=	Tingkat pemahaman dan keterbatasan mata pencaharian yang relatif rendah	Sosialisasi berkelanjutan dari pihak terkait
	❖ % penurunan illegal fishing	50	Tingkat pemahaman dan keterbatasan mata pencaharian yang relatif rendah	Sosialisasi berkelanjutan dari pihak terkait
	❖ SOP bidang ketentraman dan ketertiban umum yang tersusun			SOP yang sudah tersedia sebelumnya

Tabel 3.3 Identifikasi dan Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas Kecamatan Pasimasunggu (Tabel T-B.36)

3. 2. Telaah Program Bupati Kepulauan Selayar Terpilih 2021 – 2026

Setiap Rencana Strategis (Renstra) harus berpedoman pada Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Selayar, agar dalam pencapaian tujuan pembangunan terdapat sinkronisasi. Dalam hal ini visi dan misi Kecamatan Pasimasunggu sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun Visi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 dirumuskan sebagai berikut :

“ Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia ”.

Bandar Maritim adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kepelabuhanan yang memiliki kawasan khusus untuk melayani penumpang dan bongkar/muat barang, serta perdagangan barang, jasa dan industri. Indikator utama yang hendak diwujudkan pada akhir periode RPJMD dengan visi Bandar Maritim ini adalah:

1. Kepulauan Selayar berperan menjadi simpul transportasi laut nasional;
2. Pengelolaan sumberdaya alam yang optimal dengan keseimbangan lingkungan hidup yang terjamin;
3. Kepulauan Selayar menjadi penyuplai kebutuhan pangan nasional dari komoditas perikanan serta menjadi penyedia komoditas ekspor perikanan dan non perikanan;
4. Peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan daya saing daerah.
5. Bandar maritim didukung oleh tiga pilar pembangunan yaitu:
 1. Kawasan Distribusi Logistik di Pammatata dan sekitarnya, ditopang oleh 5 (lima) sub-kawasan yakni:
 - Sub-kawasan utama pada Pelabuhan Benteng;
 - Sub-kawasan 2 (dua) pada kawasan pelabuhan Benteng-Jampea;
 - Sub-Kawasan 3 (tiga) pada Kawasan Pelabuhan Bonerate;
 - Sub-Kawasan 4 (empat) pada Kawasan Pelabuhan Tanamalala.
 2. Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata di Pasi-Gusung, didukung oleh tujuh sub-kawasan yakni:
 - a. Sub-Kawasan 1 pada Kawasan Matalalang;
 - b. Sub-Kawasan 2 pada Kawasan Baloiya;
 - c. Sub-Kawasan 3 pada Kawasan Pantai Pinang;
 - d. Sub-Kawasan 4 pada Kawasan Pantai Bahuluang;
 - e. Sub-Kawasan 5 pada Kawasan Pantai Polassi;
 - f. Sub-Kawasan 6 pada Kawasan Pantai Kayuadi;
 - g. Sub-Kawasan 7 pada Kawasan Pantai Pulau Panjang.

3. Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) di Hangkoang, yang didukung oleh 5 (lima) sub-sentra:
 - a. Sub Sentra Utama pada Kawasan TPI Bonehalang;
 - b. Sub-Sentra 1 pada Kawasan Pelabuhan Kayuadi;
 - c. Sub-Sentra 2 pada Kawasan Pelabuhan Benteng-Jampea;
 - d. Sub-Sentra 3 pada Kawasan Pelabuhan Bonerate;
 - e. Sub-Sentra 4 pada Kawasan Pelabuhan Tanamalala.

Kawasan Timur Indonesia: berada pada kawasan timur Indonesia dengan jaringan (hub) perdagangan barang/jasa, industri, dan distribusi logistic yang mencakup kabupaten/kota pada wilayah Teluk Bone, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah Bagian Timur, Maluku dan Maluku Utara.

Dimana dalam mencapai visi tersebut di dalam RPJMD ditetapkan misi yang berfungsi sebagai upaya untuk mewujudkan visi yang rumusnya dapat dielaborasi sebagai berikut :

Misi dalam RPJMD ini diartikan sebagai upaya umum dalam mewujudkan visi. Misi yang diajukan oleh kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut.

1. Mengembangkan tatakelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan
2. Meningkatkan kualitas pembangunan perdesaan
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat
4. Mengembangkan pengelolaan potensi kelautan
5. Meningkatkan pembinaan kehidupan sosial dan keagamaan
6. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup

Tujuan dalam RPJMD ini diartikan sebagai kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan selama periode RPJMD. Menurut Permendagri 86/2017, rumusan tujuan pembangunan memiliki kriteria:

1. Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah dengan memperhatikan visi;
2. Untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan;

3. Disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
4. Dapat diukur dalam jangka waktu lima tahunan; dan
5. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Perumusan visi secara garis besar dengan langkah-langkah: ^{[[L]]}_{[[SEP]]}

1. Merumuskan rancangan pernyataan tujuan dari setiap misi dan melihat kesesuaian dengan program kepala daerah terpilih; ^{[[L]]}_{[[SEP]]}
2. Menguji apakah rancangan pernyataan tujuan dapat memecahkan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
3. Merumuskan indikator tujuan yang memenuhi kriteria SMART-C.

Sasaran dalam RPJMD ini diartikan sebagai rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Kriteria sasaran adalah:

1. Dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan; ^{[[L]]}_{[[SEP]]}
2. Satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran;
3. Disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan
4. Memenuhi kriteria SMART-C.

Sasaran dirumuskan melalui langkah-langkah:

1. Merumuskan rancangan pernyataan-pernyataan sasaran dari setiap tujuan;
2. Merumuskan indikator sasaran yang terukur, sekurang-kurangnya memenuhi indikator sasaran pokok RPJPD yang relevan; dan ^{[[L]]}_{[[SEP]]}
3. Menyelaraskan rancangan pernyataan-pernyataan sasaran dan capaian indikator yang terukur terhadap pernyataan arah kebijakan dan sasaran RPJMN untuk penyusunan rancangan awal RPJMD.

3. 3. Telaah Renstra K/L dan Renstra

Dengan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar periode 2021– 2026, maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, paling lambat 6 bulan setelah terpilih dan dilantik, Dokumen RPJMD sudah harus ditetapkan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat 5 tujuan pelaksanaan system perencanaan pembangunan nasional, yaitu :

1. Untuk mendukung kooordinasi antar pelaku pembangunan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antar pusat dan daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
4. Mengeoptimalkan partisipasi masyarakat, dan.
5. Menjami terciptanya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ini, dijiwai semangat memperkuat sibergi antar bidang.

Sinergi antarbidang pembangunan sangat penting untuk kelancaran pelaksanaan dan tercapainya berbagai sasaran dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021– 2026. Pada dasarnya pembangunan disetiap bidang pemerintahan, untuk mencapai keberhasilan tidak dapat berdiri sendiri, tetapi saling terkait dengan pemangunan dibidang lainnya. Dengan pembiayaan yang terbatas, untuk mencapai efektivitas, efisiensi dan hasil maksimal dalam mencapai sasaran pembangunan daerah, harus dilakukan sinkronisasi pembangunan disetiap bidang sehingga kegiatan di setiap bidang saling terpadu, mendukung dan saling memperkuat. Setiap unit kerja, Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar, yang melaksanakan pembangunan daerah di

setiap urusan bidang pemerintahan harus memiliki komitmen yang kuat untuk mencapai sinergi tersebut melalui proses komunikasi, konsultasi, koordinasi serta monitoring dan evaluasi dengan pemangku kepentingan terkait baik di tingkat local maupun pusat maupun provinsi sekaligus mengedepankan keberhasilan bersama dalam pencapaian sasaran pembangunan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 2021– 2026 ini juga diarahkan menjadi sebuah rencana kerja jangka menengah daerah yang bersifat menyeluruh. Persoalan yang bersifat lintas bidang harus ditangani secara holistic dan tidak berfrakmentasi sehingga dapat menyelesaikan persoalan yang sebenarnya. Pencapaian kinerja pembangunan tersebut menjadi komitmen semua pihak khususnya Perangkat Daerah untuk dapat merealisasikannya secara sungguh – sungguh demi kepentingan masyarakat dan daerah. Oleh karena itu, disusun pula rencana kerja yang bersifat lintas bidang. Kebijakan lintas minat ini akan menjadi sebuah rangkaian kebijakan antar bidang yang terpadu meliputi prioritas, fokus prioritas serta kegiatan prioritas lintas bidang untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah yang semakin kompleks.

Selanjutnya, kebijakan umum RPJMD 2021-2026 ini pada akhirnya ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan visi Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2025 yaitu “ mewujudkan Kabupaten Maritim yang Sejahtera, Maju dan Berkelanjutan”

Penyusunan perubahan kebijakan umum Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2026 dikelompokkan sesuai bidang utama pengembangan program pembangunan daerah, yaitu (1) bidang sosial budaya; (2) bidang ekonomi; (3) bidang fisik sarana dan prasarana ; (4) bidang pemerintahan.

Kebijakan umum pembangunan sosial budaya merepresntasikan misi 1, 2, 3, dan 7. Kebijakan umum dalam bidang ekonomi,

merepresentasikan ke 4, 5, dan 6. Kebijakan umum bidang fisik sarana dan prasarana merepresentasikan misi ke 4, 5, dan 6

Kemudian, kebijakan umum bidang pemerintahan merepresentasikan misi 2. Namun, kebijakan umum bidang pemerintahan ini mewadahi urusan urusan yang secara implisit dapat tertampung dalam ke-7 misi yang ada. Penyusunan kebijakan umum dalam kelompok bidang utama pembangunan daerah ini sekaligus merepresentasikan cara mencapai sasaran dalam masing-masing bidang pembangunan daerah.

Selanjutnya gambaran kebijakan umum pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021– 2026, sebagai berikut :

1. Kebijakan Umum Bidang Sosial Budaya.
 - a. Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengalaman nilai-nilai keagamaan dalam segala aktifitas masyarakat melalui internalisasi nilai-nilai keagamaan dalam setiap aktifitas kehidupan.
 - b. Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap sumber-sumber ekonomi melalui pembinaan dan peningkatan pemberdayaan penduduk miskin.
 - c. Meningkatkan daya beli masyarakat melalui perbaikan income perkapita, pengendalian harga, dan perluasan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan perkapita.
 - d. Menuntaskan penduduk buta aksara melalui peningkatan pembinaan keaksaraan.
 - e. Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan melalui peningkatan pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu dan terjangkau di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan.
 - f. Menyelenggarakan pendidikan yang berkarakter melalui internalisasi nilai-nilai moral terhadap peserta didik.
 - g. Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, mencegah dan penanggulangan berbagai penyakit menular dan

tidak menular, serta kasus kekurangan gizi, pemberdayaan masyarakat dan perbaikan manajemen kesehatan.

- h. Meningkatkan kualitas kesejahteraan keluarga melalui peningkatan kualitas keluarga.
 - i. Meningkatkan kualitas kesetaraan gender melalui pemberdayaan dan pemberian kesempatan bagi kamu perempuan dalam setiap aspek kehidupan.
 - j. Meningkatkan upaya pembinaan dan pemberdayaan pemuda melalui peningkatan keahlian dan keterampilan pemuda.
 - k. Meningkatkan pembinaan kelolahragaan bagi pemuda dan masyarakat melalui pembudayaan dan peningkatan prestasi keolahragaan.
 - l. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar melalui : mengoptimalkan dukungan dan fasilitasi terhadap layanan ketenagakerjaan, serta perluasan lapangan kerja.
 - m. Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengalaman tradisi dan nilai-nilai kearifan local dalam segala aktifitas masyarakat melalui pengintegrasian tradisi dan nilai-nilai kearifan local kedalam setiap aktifitas masyarakat dan kegiatan kesiswaan.
2. Kebijakan Umum Pembangunan Bidang Ekonomi.
- a. Meningkatkan layanan jasa perhubungan dan transportasi melalui pengoptimalan dukungan dari pemerintah tingkat atas dalam penyelenggaraan jasa perhubungan dan transportasi.
 - b. Meningkatkan kualitas layanan jasa perhubungan dan transportasi antar pulau melalui penyediaan jasa angkutan laut dari dan ke wilayah kepulauan.
 - c. Meningkatkan minat dan daya tarik wisata melalui; pengoptimalan dukungan terhadap pengembangan kepariwisataan daerah, peningkatan promosi dan pengembangan obyek wisata, peningkatan sadar wisata bagi masyarakat dan peningkatan kapasitas kelembagaan kepariwisataan.

- d. Meningkatkan minat dan daya tarik investasi melalui peningkatan promosi, pemberian kemudahan berinvestasi dan jaminan kepastian hukum bagi investor.
- e. Meningkatkan dukungan kerjasama berbagai pihak agar dapat ditetapkan dan dikembangkan bagian selatan Pulau Selayar sebagai KEK pariwisata melalui peningkatan dukungan kerja sama berbagai pihak yang terkait, penyediaan infrastruktur utama dan pendukung kegiatan kepariwisataan pada kawasan yang telah ditetapkan (bagian selatan Pulau Selayar).
- f. Menjadikan sektor perikanan sebagai salah satu penggerak utama pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berperan dalam pengembangan kawasan regional secara terpadu melalui peningkatan dukungan kerja sama berbagai pihak terkait penyediaan infrastruktur utama dan pendukung kegiatan industry terpadu, dan pengembangan industry kapal rakyat.
- g. Meningkatkan dukungan kerjasama berbagai pihak agar dapat ditetapkan dan dikembangkan bagian utara Pulau Selayar sebagai kawasan distribusi logistic melalui peningkatan dukungan kerjasama berbagai pihak terkait penyediaan infrastruktur utama dan pendukung kegiatan distribusi logistic pada kawasan yang telah ditetapkan (bagian utara Pulau Selayar).
- h. Meningkatkan dukungan kerjasama berbagai pihak agar dapat ditetapkan dan dikembangkan bagian utara Pulau Selayar sebagai kawasan industry perkapalan strategis nasional melalui peningkatan kerjasama berbagai pihak terkait dengan penyediaan infrastruktur utama dan pendukung pada kawasan industry perkapalan strategis nasional.
- i. Memperkuat posisi dan peran strategis Selayar melalui peningkatan dukungan kerjasama berbagai pihak agar Kabupaten Kepulauan Selayar dapat ditetapkan dan dikembangkan sebagai salah satu basis utama pertahanan Negara.

- j. Melaksanakan revolusi tani melalui peningkatan kapasitas kelembagaan petani.
 - k. Melaksanakan pemurnian dan pembiakan ternak sapi melalui :
Penetapan Pulau Tamalala sebagai pusat pemurnian sapi bali, penetapan pulau Kalao sebagai pusat pembiakan sapi unggul dan lokalisasi pengembangan usaha peternakan pada setiap kecamatan dan pembinaan pada usaha ternak rakyat.
 - l. Mengembangkan kawasan hutan rakyat melalui pemanfaatan lahan kritis sebagai kawasan konservasi hutan rakyat.
 - m. Membangun sentra pengembangan komoditas perikanan dan kelautan melalui penguatan kelembagaan nelayan.
 - n. Melaksanakan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup melalui pelaksanaan pembangunan kawasan dan atau wilayah berdasarkan rekomendasi analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).
 - o. Meningkatkan kapasitas dan peran kelembagaan ekonomi kerakyatan melalui pengoptimalan dukungan dan fasilitasi pengembangan ekonomi kerakyatan.
3. Kebijakan Umum Pembangunan Bidang Fisik-Sarana dan Prasarana
- a. Meningkatkan kapasitas infrastruktur perhubungan dan transportasi melalui penyediaan infrastruktur perhubungan baik darat, laut, dan udara.
 - b. Meningkatkan kapasitas infrastruktur air dan irigasi melalui pembangunan dan peningkatan bendungan dan jaringan irigasi.
 - c. Meningkatkan kapasitas infrastruktur perumahan dan kawasan pemukiman melalui pembangunan dan peningkatan perumahan dan kawasan pemukiman.
 - d. Meningkatkan kapasitas infrastruktur energy melalui penyediaan energy listrik bagi rumah tangga dan industry.
 - e. Meningkatkan kualitas layanan jasa perhubungan dan transportasi antar pulau melalui penyediaan infrastruktur ke pelabuhan.

- f. Mejadikan sektor perikanan sebagai salah satu penggerak utama pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berperan dalam pengembangan kawasan regional secara terpadu melalui pembangunan infrastruktur utama dan pendukung kawasan pelabuhan perikanan nasional.
4. Kebijakan Umu Pembangunan Bidang Tata Pemerintahan
 - a. Meningkatkan kualitas kerukunan kehidupan beragama melalui penciptaan kondisi yang kondusif dan toleran bagi pelaksanaan kehidupan beragama.
 - b. Meningkatkan kemampuan dan kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah melalui pengoptimalan dukungan dari pemerintah tingkat atas dalam pembiayaan pembangunan daerah. Peningkatan kualitas sumber-sumber pendapatan asli daerah serta pencegahan terjadinya potensi kebocoran anggaran, peningkatan kualitas pembiayaan pembangunan daerah, peningkatan kualitas manajemen asset daerah.
 - c. Meningkatkan kualitas koordinasi penyelenggaraan program lintas sektor melalui penguatan kelembagaan pemerintah daerah dan peningkatan kinerja penyelenggaraan program pembangunan daerah.
 - d. Meningkatkan kualitas manajemen aparatur pemerintah daerah termasuk di dalamnya penerapan punishment dan reward melalui penerapan manajemen aparatur sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit system.
 - e. Menyelenggarakan pelayanan public yang berkualitas melalui perbaikan dan penerapan system dan prosedur pelayanan public.
 - f. Memelihara kondisi ketentraman dan ketertiban yang kondusif melalui peningkatan kewaspadaan dan daya antisipatif terhadap kemungkinan munculnya tindakan yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

- g. Membuka kawasan baru untuk pengembangan transmigrasi local melalui pembangunan dan pengembangan kawasan untuk penetapan transmigran local.
- h. Meningkatkan upaya pembinaan dan pemberdayaan pemuda melalui peningkatan keahlian dan keterampilan pemuda.
- i. Meningkatkan integritas, kualitas, kapasitas, profesionalisme, aparat pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan public melalui penerapan mekanisme kerja yang berorientasi pada pengembangan profesionalisme, pengembangan standar kompetensi aparatur dan peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah desa.

3. 4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian lingkungan Strategis Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

3.4.1 Telaah RTRW

Kebijakan kewilayahan Kabupaten Kepulauan Selayar merujuk pada kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana terdapat dalam dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) 2010 – 2030 Kabupaten Kepulauan Selayar yang merupakan arahan tindakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan penetapan wilayah ruang kabupaten.

3.4.2 Telaah KLHS

Kebijakan penataan ruang Kabupaten Kepulauan Selayar, terdiri atas :

1. Pengembangan keterpaduan system perkotaan dan pedesaan.
2. Pengembangan aksesibilitas jaringan transportasi kepulauan
3. Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan haak dasar dan dalam rangka perwujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana.

4. Pemantapan fungsi kawasan lindung yang meliputi Taman Nasional Laut Takabonerate, hutan lindung, kawasan lindung, cagar alam laut, dan lain-lain.
5. Pemanfaatan potensi sumber daya alam yang ramah lingkungan guna mendorong pengembangan ekonomi wilayah.
6. Peningkatan produktifitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan.
7. Pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan kelalutan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi dikelola secara berhasilguna, terpadu dan ramah lingkungan.
8. Pengembangan kawasan pusat distribusi kebutuhan pangan pokok KTI dan pendukung perminyakan di Pamatata.
9. Pengembangan kawasan industri perikanan terpadu dan pusat budidaya ikan karang nasional
10. Pengembangan pusat destinasi pariwisata bahari andalan nasional
11. Pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang melibatkan potensi local SDM untuk mendukung peningkatan aspek bahari dan maritime di wilayah Kabupaten.
12. Pengembangan aspek pertahanan dan keamanan pulau-pulau kecil di wilayah kabupaten.

3. 5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Dari hasil telaah berbagai dokumen strategis sebagaimana diuraikan sebelumnya, terdapat berbagai isu strategi yang dikelompokkan ke dalam isu strategis hasil analisis lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan serta isu strategis hasil analisis lingkungan eksternal berupa peluang dan tantangan.

1. Analisis Lingkungan Internal
 - a. Kekuatan

- ❖ Komitmen Camat beserta jajaran pemerintahan pada tingkat kecamatan dan desa dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.
- ❖ Wilayah kerja kecamatan yang luas dengan potensi sumber daya alam yang melimpah baik potensi yang ada di darat maupun potensi kelautan. Khusus untuk potensi kelautan yang sangat dominan dan potensial untuk dikembangkan.
- ❖ Potensi pengembangan sektor pariwisata yang prospektif terutama pengembangan pulau-pulau kecil yang salah satunya adalah Pulau Kakabia, Pulau Bontosaile Kecil, Pulau Kaju Pangnga' Besar dan Pulau Kaju Pangnga' Kecil serta keluasan area terumbu karang yakni Taka lambena yang berada di wilayah Kecamatan Pasimasunggu.

b. Kelemahan

- ❖ Terbatasnya ketersediaan SDM aparatur baik dari sisi jumlah maupun kualitas.
- ❖ Lemahnya intensitas dan kualitas koordinasi baik antar bidang, antar sektor, maupun antar tingkat pemerintahan.
- ❖ Terbatasnya sarana dan prasarana pemerintahan baik pada tingkat kecamatan maupun desa yang berorientasi pada pengembangan potensi kelautan juga potensi perkebunan dll.
- ❖ Masih terbatasnya fasilitas kerja.
- ❖ Alokasi anggaran kecamatan yang relative masih rendah jika dibandingkan dengan luas wilayah, beban, dan volume kerja serta resiko dalam melaksanakan tugas kedinasan.
- ❖ Kualitas SDM masyarakat yang relative rendah yang disebabkan dari masih rendahnya tingkat pendidikan secara umum.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Peluang

- ❖ Komitmen Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam membangun dan mengembangkan wilayah kepulauan dalam rangka

terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan secara menyeluruh dan merata sesuai dengan visi misi yang berfokus pada kemaritiman.

- ❖ Nilai ekonomis komoditas pertanian, perkebunan, dan perikanan yang relative tinggi di pasar regional, nasional, maupun global.
- ❖ Potensi investasi yang relative besar dan prospektif terutama di sektor perikanan dan pariwisata (bahari).

b. Tantangan

- ❖ Kondisi geografis Kecamatan Pasimasunggu yang wilayahnya sebagian besar adalah laut yang terdiri atas beberapa pulau.
- ❖ Akses yang relative sulit baik dalam hubungannya dengan Ibukota Kabupaten maupun hubungan antar pulau-pulau yang ada dalam wilayah Kecamatan Pasimasunggu yang hal ini juga tergantung pada kondisi cuaca.
- ❖ Masih terbatasnya layanan infrastruktur dasar, meliputi : kesehatan, pendidikan, jalan, listrik, air bersih, gudang produksi, pangan, dan infrastruktur kelautan.

Tabel 3.3. Pembobotan isu-isu strategis

No.	Kriteria	Bobot
1	Komitmen Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam membangun dan mengembangkan wilayah kepulauan dalam rangka terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan secara menyeluruh dan merata sesuai dengan visi misi yang berfokus pada kemaritiman.	30
2	Nilai ekonomis komoditas pertanian, perkebunan, dan perikanan yang relative tinggi di pasar regional, nasional, maupun global.	25
3	Potensi investasi yang relative besar dan prospektif terutama di sektor perdagangan (distriusi barang), perikanan dan pariwisata (bahari).	25
4	Letak wilayah di tenggara yang berbatas langsung dengan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, hal ini bisa dikembangkan menjadi gerbang perdagangan barang dan jasa.	20
		100



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4. 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Pasimasunggu

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian visi dan masing-masing misi. Sementara sasaran adalah target atau hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Oleh karena itu, sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

Adapun tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Pasimasunggu Selayar 2021-2026 yang kemudian diimplementasikan dalam Renstra Kecamatan Pasimasunggu 2021-2026 yang dirumuskan berdasarkan masing-masing misi adalah sebagai berikut :

Misi 1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan, memiliki tujuan pembangunan :

- a. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan, dengan sasaran berikut ini :
 - a) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat
 - b) Meningkatnya Nilai SAKIP
 - c) Meningkatnya Penilaian BPK

Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan, memiliki tujuan:

- a. Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan, dengan sasaran berikut ini :
 - a) Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa

b) Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa

Misi 5 : Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan, memiliki tujuan pembangunan:

a. Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan, dengan sasaran berikut ini :

a) Meningkatnya upaya pelestarian kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial

b) Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Keagamaan

Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Pasimasunggu tahun 2021 – 2026 sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :



Tabel 4.1. Tujuan, Sasaran dan Sasara Jangka Menengah Kecamatan Pasimasunggu.

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Pasimasunggu	Meningkatnya Nilai SAKIP Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Laporan Keuangan Pemerintahan Kecamatan sesuai SAP Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Nilai SAKIP Kecamatan Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan Indeks Kepuasan Masyarakat	60,2 Sesuai 70%	65,2 Sesuai 72%	70,2 Sesuai 75%	75,2 Sesuai 80%	80,0 Sesuai 85%
2.	Meningkatkan kualitas koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi dan keselarasan pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan di wilayah kecamatan	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan di seluruh urusan pemerintahan dalam wilayah kecamatan Pasimasunggu	% Kebijakan Pembangunan seluruh urusan yang sinkron, harmonis, selaras maupun antar tingkat pemerintahan di wilayah kecamatan	100	100	100	100	100
			%Penduduk yang mampu mengakses layanan seluruh urusan pemerintahan secara mudah, layak, dan terjangkau di wilayah kecamatan	100	100	100	100	100

Tabel 4.2. Perubahan Tujuan, Sasaran dan Sasara Jangka Menengah Kecamatan Pasimasunggu

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Mewujudkan Reformasi Birokrasi Kecamatan Pasimasunggu		Indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan Pasimasunggu	55	64	68	73	76
	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan pasimasunggu	Nilai Sakip Kecamatan Pasimasunggu	60	65	70	75	85
		Laporan Keuangan Kecamatan Pasimasunggu sesuai SAP	sesuai	sesuai	sesuai	sesuai	sesuai
		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pasimasunggu	70	72,5	75	80	85
Meningkatkan kapasitas dan fasilitas perdesaan Kecamatan Pasimasunggu		Indeks Desa Membangun Kecamatan Pasimasunggu	0,6300	0,6650	0,7000	0,7150	0,7300
	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Peningkatan Fungsi Lembaga Desa yang Dikoordinasikan	63	66	70	71	73

Meningkatkan upaya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial di Kecamatan Pasimasunggu		Indeks Ketahanan Sosial Kecamatan Pasimasunggu	0,69	0,7	0,71	0,715	0,715
	Meningkatnya tatanan kehidupan sosial masyarakat	Tingkat solidaritas sosial di Kecamatan	69	70	71	71,5	71,5
Meningkatkan kapasitas kelembagaan keagamaan di Kecamatan Pasimasunggu		Indeks Kesalehan Sosial Kecamatan Pasimasunggu	63	65,15	67,3	70	75
	Meningkatnya toleransi Kehidupan sosial kemasyarakatan di Kecamatan Pasimasunggu	Tingkat toleransi di Kecamatan	63	65	67	70	75
Meningkatkan kapasitas dan fasilitas perdesaan Kecamatan Pasimasunggu		Indeks Desa Membangun Kecamatan Pasimasunggu	0,63	0,665	0,7	0,715	0,73
	Meningkanya Kualitas Pemerintahan Desa	Persentase Urusan Pemerintahan Desa yang Difasilitasi	100	100	100	100	100



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Kecamatan Pasimasunggu adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah. Strategi dan kebijakan Kecamatan Pasimasunggu diselaraskan dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD 2021 - 2026.

Strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan Pasimasunggu menjadi dasar perumusan kegiatan serta target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Pasimasunggu.

a. Strategis

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab cara pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dan jangka waktu pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab satu sasaran pembangunan ataupun lebih dari satu sasaran pembangunan, dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran.

b. Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Kebijakan yang dirumuskan harus dapat:

1. Membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional;
2. Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional;

3. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas Kecamatan Pasimasunggu yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih; dan
4. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tupoksi Kecamatan Pasimasunggu agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum.



Tabel 5.1. Tujuan , Sasaran, Strategis, dan Kebijakan

VISI : Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Indonesia Timur			
MISI 1: Mengembangkan Tatakelola Pemerintahan yang akuntabel dan transparan.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkannya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	meningkatkan inovasi serta pemamfaatan teknologi dalam pelayanan;	Melakukan Inovasi dan Aksi perubahan dalam pelayanan
	Meningkatnya Nilai Sakip Kecamatan	Meningkatkan SDM Aparatur, efesiensi perencanaan dan pelaksanaan anggaran	Peningkatan kulitas SDM aparatur melalui Diklat
	Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan dan Aset Daerah	Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur
MISI 2 : Meningkatkan kualitas pembangunan perdesaan			
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Mengoptimalkan koordinasistakeholder dalam rangka peningkatan produktifitas masyarakat perdesaan	Pengembangan kelembagaan dan perekonomian desa

	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa	Meningkatkan Pembinaan dan pengawasan Desa dalam pembangunan	Pelaksanaan sosialisasi untuk meningkatkan Kualitas SDM Kepala desa dan Perangkat Desa
MISI 5 : Meningkatkan Pembiayaan Kehidupan sosial dan keagamaan			
Meningkatnya Ketahanan sosial Masyarakat	Meningkatnya upaya pelestarian kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial	Meningkatkan wawasan kebangsaan, Persatuan dan kesatuan bangsa, Kerukunan antar suku dan intrasuku, Umat beragama, ras dan Golongan lainnya	Peningkatan wawasan kebangsaan Masyarakat melalui Pembinaan, Bimtek dan Sosialisasi
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Keagamaan	Meningkatnya Fasilitas keagamaan	Meningkatkan peran lembaga keagamaan dalam pembangunan manusia dan Daerah	Peningkatan fasilitasi kegiatan keagamaan;

Tabel 5.2. Perubahan Tujuan , Sasaran, Strategis, dan Kebijakan

VISI : Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Indonesia Timur			
MISI 1: Mengembangkan Tatakelola Pemerintahan yang akuntabel dan transparan.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Reformasi Birokrasi Kecamatan Pasimasunggu	Indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan Pasimasunggu		
	Nilai Sakip Kecamatan Pasimasunggu	Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan pasimasunggu	Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur
	Laporan Keuangan Kecamatan Pasimasunggu sesuai SAP		Peningkatan kualitas SDM aparatur melalui Diklat
	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pasimasunggu		Melakukan Inovasi dan Aksi perubahan dalam pelayanan
	Persentase Peningkatan Fungsi Lembaga Desa yang Dikoordinasikan	Meningkatkan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pelaksanaan bimbingan teknis fungsi kelembagaan dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat desa
MISI 2 : Meningkatkan kualitas pembangunan perdesaan			
Meningkatkan kapasitas dan fasilitas perdesaan Kecamatan Pasimasunggu	Indeks Desa Membangun Kecamatan Pasimasunggu		
	Persentase Urusan Pemerintahan Desa yang Difasilitasi	Meningkanya Kualitas Pemerintahan Desa	Peningkatan Sumber daya manusia di pemerintahan desa
MISI 5 : Meningkatkan Pembiaan Kehidupan sosial dan keagamaan			

Meningkatkan upaya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial di Kecamatan Pasimasunggu	Indeks Ketahanan Sosial Kecamatan Pasimasunggu		
	Tingkat solidaritas sosial di Kecamatan	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat	Pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan
Meningkatkan kapasitas kelembagaan keagamaan di Kecamatan Pasimasunggu	Indeks Kesalehan Sosial Kecamatan Pasimasunggu		
	Tingkat toleransi di Kecamatan	Meningkatkan toleransi Kehidupan sosial kemasyarakatan di Kecamatan Pasimasunggu	Pelaksanaan kegiatan keagamaan di kecamatan



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Maka Program Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar yang dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu lima tahun ke depan dengan sumber dana APBN/APBD.

Program dan Kegiatan dimaksud hanya program dan kegiatan lokalitas kewenangan Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar. Secara terperinci disajikan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan penyelenggaraan administrasi, penataan kepegawaian dan administrasi keuangan secara efektif dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pasimasunggu di Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan/subkegiatan yaitu :

Kegiatan :

A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-Perangkat Daerah
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-Perangkat Daerah
- d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-Perangkat Daerah
- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- Perangkat Daerah
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah

- B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran Perangkat Daerah
- C. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
 - a. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- D. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - b. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - c. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- E. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - f. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah
- F. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - a. Pengadaan Mebel
 - b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- G. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- H. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- a. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - b. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

UNSUR KEWILAYAHAN

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan bagi aparatur dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk pendukung terlaksanannya pelayanan publik. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan / subkegiatan yaitu :

Kegiatan :

- A. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan;
 - a. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
- B. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
 - a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah desanya. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan-kegiatan yaitu :

Kegiatan :

- A. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

- b. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
- c. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan Pasimasunggu. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan / subkegiatan yaitu :

Kegiatan :

- A. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - b. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Program ini dimaksudkan untuk terselenggaranya urusan pemerintahan secara umum yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Pasimasunggu. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan / subkegiatan yaitu :

- A. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah;
 - a. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian

Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

- b. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
- c. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Program ini dimaksudkan untuk mengoordinasikan dan fasilitasi dan melakukan pembinaan serta pengawasan pemerintahan desa, baik dari segi pengelolaan pemerintahan, pengelolaan keuangan, perencanaan pembangunan, pembangunan kawasan, dan demikian pula dengan pula badan permusyawaratan desa. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan / subkegiatan yaitu :

- A. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
 - a. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - b. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - c. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa
 - d. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
 - e. Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
 - f. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - g. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
 - h. Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa
 - i. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan



Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Pasimasunggu
Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Tujuan	Sasaran	Nomenklatur Urusan (Program / Kegiatan / Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja OPD Penganggung Jawab	Lokasi				
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Tar-get	Rp. (000.000)	Tar-get	Rp. (000.000)	Tar-get	Rp. (000.000)	Tar-get	Rp. (000.000)	Tar-get	Rp. (000.000)			Tar-get	Rp. (000.000)		
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																		
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen kinerja																	
	Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan masyarakat (T-1)	Meningkatnya kualitas tatalaksana dan kapasitas organisasi pemerintahan (S-2)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan		4 dok	11.623													Kab. Kep. Slyr	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen RKA				1 dok	2.75	1 dok	2.75	1 dok	2.75		Kab. Kep. Slyr						
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen Perubahan RKA				1 dok	2.75	1 dok	2.75	1 dok	2.75		Kab. Kep. Slyr						
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen DPA				1 dok	6.875	1 dok	6.875	1 dok	6.875		Kab. Kep. Slyr						
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersusunnya dokumen Perubahan DPA				1 dok	6.875	1 dok	6.875	1 dok	6.875		Kab. Kep. Slyr						

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen LAKIP, LPPD, LKPJ	3 dok	4.52	3 dok	7.25	Kab. Kep. Slyr										
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan Tunjangan ASN	100 %	1052	100 %	1150	100 %	1250	100 %	1300	100 %	1350	1	1350			Kec. Pasimasunggu
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya laporan realisasi anggaran	1 dok	7.22	1 dok	6.625	Kab. Kep. Slyr										
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya laporan realisasi fisik keuangan	2 dok	8.84	2 dok	13.25	Kab. Kep. Slyr										
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD													
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD													
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD													
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD													
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersusunnya laporan aset BMD	1 dok	1 dok	13.25	Kab. Kep. Slyr								
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD													
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD													
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai													
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas lengkap	100 %	100 %	7.5	100 %	7.5	100 %	7.5	100 %	7.5	100%	7.5	Kec. Pasimasunggu
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian													

Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tersusunnya informasi kepegawaian	100 %	100 %	5	100 %	5	100 %	5	100 %	5	100%	5	Kab. Kep. Slyr	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
Pemulangan Pegawai yang Pensiun														
Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas														
Pemindahan Tugas ASN														
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatnya SDM pegawai	100 %	30.261	100 %	25	100 %	25	100 %	25	100 %	25	100%	25	Prov. Sul Sel
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
Administrasi Umum Perangkat Daerah														
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya penerangan kantor	100 %	1.716	100 %	2	100 %	2	100 %	2	100 %	2	100%	2	Kec. Pasimas ungu
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	277.855	100 %	15	100 %	15	100 %	15	100 %	15	100%	15	Kec. Pasimas ungu
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	100 %	268.175	100 %	22	100 %	22	100 %	22	100 %	22	100%	22	Kec. Pasimasunggu
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100 %	57.303	100 %	5	100 %	5	100 %	5	100 %	5	100%	5	Kec. Pasimasunggu
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100 %	34.877	100 %	3.6	100 %	3.6	100 %	3.6	100 %	3.6	100%	3.6	Kec. Pasimasunggu
Penyediaan Bahan/Material														
Fasilitas Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya kunjungan tamu	100 %	25.5	100 %	20	100 %	20	100 %	20	100 %	20	100%	20	Kec. Pasimasunggu
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi	100 %	153.01	100 %	169.5	100 %	174	100 %	174	100 %	182.75	100%	182.75	Prov. Sul Sel
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
Pengadaan Mebel	Tersedianya kelengkapan kantor	100 %		100 %	12					100 %	12	100%	12	Kec. Pasimasunggu

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor	100 %	100 %	100							0	0		Kec. Pasimasunggu
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	100 %	100 %	15	100 %	15	100 %	15	100 %	15	100%	15		Kec. Pasimasunggu
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya komudikasi, air dan listrik	100 %	246.208	100 %	25	100 %	25	100 %	25	100 %	25	100%	25	Kec. Pasimasunggu
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan kelengkapan kantor	100 %	13.5	100 %	15	100 %	15	100 %	15	100 %	15	100%	15	Kec. Pasimasunggu
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	100 %	1.658.352	100 %	175	100 %	175	100 %	175	100 %	175	100%	175	Kec. Pasimasunggu
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
Pemeliharaan Mebel														
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin	100 %	43.14	100 %	17	100 %	18	100 %	19	100 %	20	100%	20	Kec. Pasimasunggu
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terpeliharanya aset tetap			100 %	15	100 %	15	100 %	15	100 %	15	100%	15	Kec. Pasimasunggu

Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Perbaikan gedung kantor	100 %	200	Kec. Pasimasunggu
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah				
Peningkatan Pelayanan BLUD				
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				
UNSUR KEWILAYAHAN				
KECAMATAN				
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				

		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan												
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan												
		Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan												
Peningkatan kapasitas dan fasilitas perdesaan (T-3)	Meningkatnya pemenuhan prasarana dasar perdesaan (S-6)	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Terfasilitasinya percepatan pencapaian standar pelayanan minimal	6	9	6	9	6	9	6	9	6	9	Kec. Pasimasunggu
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan												
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum												
		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum												

		Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta												
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat												
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha												
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan												
Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan masyarakat (T-1)	Meningkatnya kinerja SKPD (S-1)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan	1 dok	10	Kab. Kep. Slyr								
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa														
Peningkatan kapasitas dan fasilitas perdesaan (T-3)	Meningkatnya pengelolaan sumberdaya lokal (S-5)	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya partisipasi masyarakat	1 dok	10	Kec. Pasimasunggu								

		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Tersinkronisnya kegiatan pemberdayaan masyarakat	2 dok	20	2 dok	20	2 dok	20	2 dok	20	2 dok	20	2 dok	20	Kec. Pasimasunggu
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya efektifitas pemberdayaan masyarakat	2dok	16.476											Kec. Pasimasunggu
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM																
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																
Peningkatan kualitas pembinaan budaya dan agama (T-9)	Meningkatnya kualitas pembinaan kemasyarakatan (S-12)	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terciptanya sinergi yang baik			1 dok	6	Kec. Pasimasunggu								
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terciptanya hubungan harmonis dalam masyarakat			1 dok	6	Kec. Pasimasunggu								
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM																
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah																

Peningkatan kualitas pembinaan budaya dan agama (T-9)	Meningkatnya kualitas pembinaan masyarakat (S-12)	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Meningkatnya kecintaan terhadap tanah air	2 kegiatan	40,045	2 kegiatan	40	Kec. Pasimasunggu								
		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														
		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa														

Peningkatan kualitas pembinaan budaya dan agama (T-9) Meningkatnya kerukunan antar suku dan antar agama (S-11)	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Terciptanya kerukunan dalam masyarakat 1 kegiatan 15 1 kegiatan 15 1 kegiatan 15 1 kegiatan 15 1 kegiatan 15	Kec. Pasimasunggu
Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		
Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila		
Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		
Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan masyarakat (T-1)	Meningkatkan kinerja SKPD (S-1) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Terlaksananya koordinasi forum pimpinan 1 dok 9 1 dok 9 1 dok 9 1 dok 9 1 dok 9	Kec. Pasimasunggu
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		

		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa												
Peningkatan kapasitas as dan fasilitas perdesaan (T-3)	Meningkatnya pengelolaan sumberdaya lokal (S-5)	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya pembinaan tata pemerintahan desa	1 dok	3	1 dok	3	1 dok	3	1 dok	3	1 dok	3	Kec. Pasimasunggu
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya pembinaan pengelolaan keuangan dan aset desa	1 dok	3	1 dok	3	1 dok	3	1 dok	3	1 dok	3	Kec. Pasimasunggu
		Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan												
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa												
		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa												
Peningkatan kapasitas as dan fasilitas perdesaan (T-3)	Meningkatnya pengelolaan sumberdaya lokal (S-5)	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Terlaksananya pembinaan BPD	1 dok	3	1 dok	3	1 dok	3	1 dok	3	1 dok	3	Kec. Pasimasunggu
		Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa												
	Meningkatnya pengelolaan sumberdaya lokal (S-5)	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Terlaksananya asistansi apb desa	1 dok	4.824	1 dok	5	Kec. Pasimasunggu						

	Meningkatnya pemenuhan prasarana dasar perdesaan (S-6)	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Terfasilitasinya pembangunan kawasan yang ideal	1 dok	3	1 dok	4	1 dok	5	1 dok	5	1 dok	5	Kec. Pasimasunggu
Peningkatan kapasitas as dan fasilitas perdesaan (T-3)	Meningkatnya pemenuhan prasarana dasar perdesaan (S-6)	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terciptanya ketenteraman dan ketertiban	1 dok	3	1 dok	4	1 dok	5	1 dok	5	1 dok	5	Kec. Pasimasunggu
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan												
Peningkatan kapasitas as dan fasilitas perdesaan (T-3)	Meningkatnya pengelolaan sumberdaya lokal (S-5)	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Terlaksananya musrenbang desa	1 dok	6	Kec. Pasimasunggu								
		Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga												
Peningkatan kapasitas as dan fasilitas perdesaan (T-3)	Meningkatnya pemenuhan prasarana dasar perdesaan (S-6)	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Terfasilitasinya penegasan batas desa	1 dok	3	Kec. Pasimasunggu								
		Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa												

Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																
Peningkatan kapasitas dan fasilitas perdesaan (T-3)	Meningkatnya pemenuhan prasarana dasar perdesaan (S-6)	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya pengawasan pembangunan kawasan desa	1 dok	2.718	1 dok	3	1 dok	5	1 dok	7	1 dok	7.5	1 dok	7.5	Kec. Pasimasunggu
				1,689.67		2,215.23		2,012.73		2,067.73		2,139.98		2,139.975		



Tabel 6.2
Perubahan Rencana Program, Kegiatan, Sub kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar
Periode 2021-2026 sesuai Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
					Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		(12)				
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(12)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)	
Mewujudkan Reformasi Birokrasi Kecamatan Pasimasunggu				Indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan Pasimasunggu	33,89	55		64		68		73		76		76			
	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan pasimasunggu			Nilai Sakip Kecamatan Pasimasunggu	0	60		65		70		75		85		85			
				Laporan Keuangan Kecamatan Pasimasunggu sesuai SAP	0	sesuai		sesuai		sesuai		sesuai		sesuai		sesuai			
				Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pasimasunggu	0	70		72,5		75		80		85		85			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
						Tahun-1 (2022)			Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		(12)		
						(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)	
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Peningkatan Pelayanan di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan	30	25	0	20	19,000,000	15	19,475,570	10	19,942,789	8	20,418,624	8	78,836,983	KECAMATAN PASIMASUNGGU	
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan (%)	100	100	0	100	8,000,000	100	8,000,000	100	8,000,000	99	8,000,000	100	32,000,000	KECAMATAN PASIMASUNGGU	
		7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	1	0	0	1	4,000,000	1	4,000,000	1	4,000,000	1	4,000,000	4	16,000,000	KECAMATAN PASIMASUNGGU	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1 (2022)			Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)			
						(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)
		7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	1	1	0	1	4,000,000	1	4,000,000	1	4,000,000	1	4,000,000	5	16,000,000	KECAMATAN PASIMASUNGGU
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Urusan pemerintahan yang diselenggarakan (%)	100	100	0	100	4,000,000	100	3,468,752	100	4,000,000	100	4,000,000	95	15,468,752	KECAMATAN PASIMASUNGGU
		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	0	1	4,000,000	1	3,468,752	1	4,000,000	1	4,000,000	5	15,468,752	KECAMATAN PASIMASUNGGU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1 (2022)			Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)			
						(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)
		7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Sarana	100	100	0	100	4,000,000	100	4,000,000	100	4,000,000	100	4,000,000	100	16,000,000	KECAMATAN PASIMASUNGGU
		7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	1	0	0	1	4,000,000	1	4,000,000	1	4,000,000	1	4,000,000	4	16,000,000	KECAMATAN PASIMASUNGGU
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100	100	0	100	3,000,000	100	4,006,818	100	3,942,789	100	4,418,624	100	15,368,231	KECAMATAN PASIMASUNGGU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1 (2022)			Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)			
						(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)
		7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	1	0	0	1	1,000,000	1	2,006,818	1	1,174,912	1	1,846,105	4	6,027,835	KECAMATAN PASIMASUNGGU
		7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	0	0	0	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,767,877	1	2,572,519	4	9,340,396	KECAMATAN PASIMASUNGGU
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja	50,91	63,03	2,121,399,519	70,28	2,087,441,478	70,53	2,139,690,139	71,51	2,191,021,305	72,31	2,243,299,073	72,31	10,782,851,514	KECAMATAN PASIMASUNGGU
				Persentase Capaian Kinerja Keuangan	79,35	83		85		88		91		95		95		
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	99	14,000,000	100	14,000,000	100	14,000,000	100	16,500,000	100	16,500,006	100	75,000,006	KECAMATAN PASIMASUNGGU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1 (2022)			Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)			
						(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)
		0.00.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	2	1,500,000	2	1,500,000	2	1,500,000	2	2,000,000	3	2,000,000	11	8,500,000	KECAMATAN PASIMASUNGGU
		0.00.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	2,500,000	1	2,500,000	1	3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	5	14,000,000	KECAMATAN PASIMASUNGGU
		0.00.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	2,500,000	1	2,500,000	1	2,500,000	1	3,000,000	1	3,000,006	5	13,500,006	KECAMATAN PASIMASUNGGU
		0.00.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	2,500,000	1	2,500,000	1	3,000,000	1	3,500,000	1	3,500,000	5	15,000,000	KECAMATAN PASIMASUNGGU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)
		0.00.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	2,500,000	1	2,500,000	1	2,000,000	1	2,500,000	1	2,500,000	5	12,000,000	KECAMATAN PASIMASUNGGU
		0.00.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	2,500,000	1	2,500,000	1	2,000,000	1	2,500,000	1	2,500,000	5	12,000,000	KECAMATAN PASIMASUNGGU
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100	100	1,691,372,895	100	1,625,671,634	100	1,629,429,851	100	1,630,412,417	100	1,635,147,791	100	8,212,034,588	KECAMATAN PASIMASUNGGU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		(12)		
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(12)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)
		0.00.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	15	15	1,687,872,895	15	1,621,171,634	15	1,619,929,851	15	1,625,912,417	15	1,631,647,791	75	8,186,534,588	KECAMATAN PASIMASUNGGU
		0.00.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	1,500,000	1	1,500,000	1	1,500,000	1	1,500,000	1	1,500,000	5	7,500,000	KECAMATAN PASIMASUNGGU
		0.00.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	500,000	1	1,000,000	1	2,000,000	1	1,000,000	1	500,000	5	5,000,000	KECAMATAN PASIMASUNGGU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		(12)		
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)
		0.00.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	0	0	1	500,00	1	1,000,00	1	1,000,00	1	500,00	4	3,000,00	KECAMATAN PASIMASUNGGU
		0.00.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4	4	1,500,00	4	1,500,00	4	5,000,00	4	1,000,00	4	1,000,00	20	10,000,000	KECAMATAN PASIMASUNGGU
		7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi Barang Milik Daerah (%)	100	100	5,000,00	100	7,000,00	100	10,000,000	100	10,000,000	100	10,000,000	100	42,000,000	KECAMATAN PASIMASUNGGU
		0.00.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	1,000,00	1	1,000,00	1	2,000,00	1	2,000,00	1	2,000,00	5	8,000,00	KECAMATAN PASIMASUNGGU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)
		0.00.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	1	1	1,000,000	1	2,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	5	12,000,000	KECAMATAN PASIMASUNGGU
		0.00.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	3,000,000	1	4,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	5	22,000,000	KECAMATAN PASIMASUNGGU
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen Administrasi kepegawaian (%)	100	100	25,000,000	100	25,000,000	100	35,000,000	100	35,000,000	100	55,000,000	100	175,000,000	KECAMATAN PASIMASUNGGU
		0.00.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	15,000,000	0	0	0	0	0	0	1	20,000,000	2	35,000,000	KECAMATAN PASIMASUNGGU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)
		0.00.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1	0	0	1	2,500,000	1	2,500,000	1	2,500,000	1	2,500,000	4	10,000,000	KECAMATAN PASIMASUNGGU
		0.00.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	0	0	1	2,500,000	1	2,500,000	1	2,500,000	1	2,500,000	4	10,000,000	KECAMATAN PASIMASUNGGU
		0.00.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1	1	10,000,000	1	20,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	5	120,000,000	KECAMATAN PASIMASUNGGU
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perkantoran (%)	100	100	88,026,624	100	100,769,844	100	119,260,288	100	120,108,888	100	135,651,276	100	563,816,920	KECAMATAN PASIMASUNGGU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)
		0.00.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	0	0	1	700,000	1	700,000	1	700,000	1	700,000	4	2,800,000	KECAMATAN PASIMASUNGGU
		0.00.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	0	0	2	7,000,000	2	7,000,000	2	7,000,000	2	7,000,000	8	28,000,000	KECAMATAN PASIMASUNGGU
		0.00.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	4,763,312	4	4,284,922	4	10,030,144	4	10,454,444	4	11,225,638	18	40,758,460	KECAMATAN PASIMASUNGGU
		0.00.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	4,763,312	2	4,284,922	2	10,030,144	2	10,454,444	2	11,225,638	10	40,758,460	KECAMATAN PASIMASUNGGU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1 (2022)			Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)			
						(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)
		0.00.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	4	4	3,500,000	4	3,500,000	4	4,500,000	4	4,500,000	4	4,500,000	20	20,500,000	KECAMATAN PASIMASUNGGU
		0.00.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	0	0	0	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	4	8,000,000	KECAMATAN PASIMASUNGGU
		0.00.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	500	400	75,000,000	400	79,000,000	400	85,000,000	400	85,000,000	400	99,000,000	200	423,000,000	KECAMATAN PASIMASUNGGU
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan BMD (%)	100	100	25,000,000	100	25,000,000	100	25,000,000	100	49,000,000	100	51,000,000	99	175,000,000	KECAMATAN PASIMASUNGGU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		(12)		
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)
		0.00.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	1	20,000,000	1	22,000,000	2	42,000,000	KECAMATAN PASIMASUNGGU
		0.00.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	4	5,000,000	4	5,000,000	4	5,000,000	4	4,000,000	4	4,000,000	20	23,000,000	KECAMATAN PASIMASUNGGU
		0.00.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	1	20,000,000	2	20,000,000	2	20,000,000	2	25,000,000	2	25,000,000	9	110,000,000	KECAMATAN PASIMASUNGGU
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang perkantoran (%)	100	100	205,000,000	100	220,500,000	100	225,500,000	100	244,500,000	100	250,000,000	100	1,145,500,000	KECAMATAN PASIMASUNGGU
		0.00.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	0	0	12	2,500,000	12	2,500,000	12	2,500,000	12	2,500,000	48	10,000,000	KECAMATAN PASIMASUNGGU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)
		0.00.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	0	0	12	8,000,000	12	8,000,000	12	8,000,000	12	8,000,000	48	32,000,000	KECAMATAN PASIMASUNGGU
		0.00.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	205,000,000	12	210,000,000	12	215,000,000	12	234,000,000	12	239,500,000	60	1,103,500,000	KECAMATAN PASIMASUNGGU
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah (%)	100	100	68,000,000	100	69,500,000	100	81,500,000	100	85,500,000	100	90,000,000	100	394,500,000	KECAMATAN PASIMASUNGGU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
						Tahun-1 (2022)			Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		K		Rp
						(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)	
		0.00.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	10	9	65,000,000	9	64,000,000	9	71,000,000	9	79,000,000	9	80,000,000	45	359,000,000	KECAMATAN PASIMASUNGGU	
		0.00.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4	0	0	2	2,500,000	6	7,500,000	4	3,500,000	4	5,000,000	16	18,500,000	KECAMATAN PASIMASUNGGU	
		0.00.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4	4	3,000,000	4	3,000,000	4	3,000,000	4	3,000,000	4	5,000,000	20	17,000,000	KECAMATAN PASIMASUNGGU	
Meningkatkan kapasitas dan fasilitas perdesaan Kecamatan Kecamatan Pasimasun				Indeks Desa Membangun Kecamatan Pasimasunggu	0	0,6300		0,6650		0,7000		0,7150		0,7300		0,7300			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		K	Rp		
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)	
ggu																			
	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa			Persentase Peningkatan Fungsi Lembaga Desa yang Dikoordinasikan	0	63		66		70		71		73		73			
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan	100	100	10,000,000	100	10,136,900	100	10,390,627	100	10,639,898	100	10,893,766	100	52,061,191		KECAMATAN PASIMASUNGGU
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dikoordinasikan	100	100	10,000,000	100	10,136,900	100	10,390,627	100	10,639,898	100	10,893,766	100	52,061,191		KECAMATAN PASIMASUNGGU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		(12)		
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)
		7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7	7	3,000,000	7	2,500,000	7	2,500,000	7	2,500,000	7	3,000,000	35	13,500,000	KECAMATAN PASIMASUNGGU
		7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	1	1	3,500,000	1	3,500,000	1	3,500,000	1	3,500,000	1	4,000,000	5	18,000,000	KECAMATAN PASIMASUNGGU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		(12)		
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)
		7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan EfektivitasKegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	3,500,000	1	4,136,900	1	4,390,627	1	4,639,898	1	3,893,766	5	20,561,191	KECAMATAN PASIMASUNGGU
Meningkatkan upaya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial di Kecamatan Pasimasunggu				Indeks Ketahanan Sosial Kecamatan Pasimasunggu	0	0,6900		0,7000		0,7100		0,7150		0,7150		0,7150		
	Meningkatnya tatanan kehidupan sosial masyarakat			Tingkat solidaritas sosial di Kecamatan	0	69		70		71		71,5		71,5		71,5		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		(12)			
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(12)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)	
	kat																		
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus Kriminalitas di tingkat kecamatan	1	1	0	1	12,000,000	1	12,300,360	1	12,595,446	1	12,895,973	1	49,791,779		KECAMATAN PASIMASUNGGU
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)	75	80	0	85	6,000,000	90	6,000,000	95	6,000,000	100	6,000,000	100	24,000,000		KECAMATAN PASIMASUNGGU
		7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	0	0	12	6,000,000	12	6,000,000	12	6,000,000	12	6,000,000	48	24,000,000		KECAMATAN PASIMASUNGGU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)
		7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (%)	100	100	0	100	6,000,000	100	6,300,360	100	6,595,446	100	6,895,973	100	25,791,779	KECAMATAN PASIMASUNGGU
		7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12	0	0	12	6,000,000	12	6,300,360	12	6,595,446	12	6,895,973	48	25,791,779	KECAMATAN PASIMASUNGGU
Meningkatkan kapasitas kelembagaan keagamaan di Kecamatan				Indeks Kesalehan Sosial Kecamatan Pasimasunggu	0	63		65,15		67,30		70		75		75		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		K	Rp		
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)	
Pasimasunggu																			
	Meningkatnya toleransi Kehidupan sosial kemasyarakatan di Kecamatan Pasimasunggu			Tingkat toleransi di Kecamatan	0	63		65		67		70		75		75			
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Konflik Sosial dan Keagamaan di tingkat kecamatan	0	0	30,000,000	0	30,410,700	0	31,171,880	0	31,919,693	0	32,681,297	0	156,183,570		KECAMATAN PASIMASUNGGU
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang di selenggarakan (%)	75	80	30,000,000	84	30,410,700	90	31,171,880	95	31,919,693	100	32,681,297	100	156,183,570		KECAMATAN PASIMASUNGGU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)
		7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	300	300	25,000,000	300	24,890,480	300	25,687,499	300	26,488,082	300	27,284,987	1500	129,351,048	KECAMATAN PASIMASUNGGU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)
		7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	50	50	5,000,000	50	5,520,220	50	5,484,381	50	5,431,611	50	5,396,310	250	26,832,522	KECAMATAN PASIMASUNGGU
Meningkatkan kapasitas dan fasilitas perdesaan Kecamatan Pasimasunggu				Indeks Desa Membangun Kecamatan Pasimasunggu	0	0,6300	2,161,399,519	0,6650	2,190,989,078	0,7000	2,245,829,536	0,7150	2,299,706,986	0,7300	2,354,577,994	0,7300	11,252,503,113	
	Meningkatkan Kualitas Pemerintahan Desa			Persentase Urusan Pemerintahan Desa yang Difasilitasi	0	100	2,161,399,519	100	2,190,989,078	100	2,245,829,536	100	2,299,706,986	100	2,354,577,994	100	11,252,503,113	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
						Tahun-1 (2022)			Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		(12)		
						(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)	
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Program pemerintahan desa yang mendukung program pemerintah	40	50	0	55	32,000,000	60	32,800,960	65	33,587,855	70	34,389,261	70	132,778,076	KECAMATAN PASIMASUNGGU	
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan Pengawasan yang difasilitasi, direkomendasi, dikoordinasikan (%)	50	60	0	70	32,000,000	80	32,800,960	90	33,587,855	100	34,389,261	100	132,778,076	KECAMATAN PASIMASUNGGU	
		7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendaayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan PendaayagunaanA set Desa (Dokumen)	1	0	0	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	4	8,000,000	KECAMATAN PASIMASUNGGU	
		7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangkaPelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	1	0	0	1	1,000,000	1	2,000,000	1	2,500,000	1	1,500,000	4	7,000,000	KECAMATAN PASIMASUNGGU	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
						Tahun-1 (2022)			Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		(12)		
						(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)	
		7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	0	0	0	1	1,000,000	0	0	0	0	1	700,000	2	1,700,000	KECAMATAN PASIMASUNGGU	
		7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	1	0	0	1	1,500,000	1	2,000,000	1	2,500,000	1	1,500,000	4	7,500,000	KECAMATAN PASIMASUNGGU	
		7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	1	0	0	1	7,500,000	1	6,800,960	1	5,587,855	1	6,689,261	4	26,578,076	KECAMATAN PASIMASUNGGU	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		(12)		
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)
		7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)	1	0	0	1	9,500,000	1	10,000,000	1	10,500,000	1	11,000,000	4	41,000,000	KECAMATAN PASIMASUNGGU
		7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	0	0	1	9,500,000	1	10,000,000	1	10,500,000	1	11,000,000	4	41,000,000	KECAMATAN PASIMASUNGGU
Total							2,161,399,519		2,190,989,078		2,245,829,536		2,299,706,986		2,354,577,994		11,252,503,113	



Tabel 6.3

Perubahan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dan Pendanaan Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar
Periode 2021-2026 Sesuai Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	R p.	K	R p.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)
Mewujudkan Reformasi Birokrasi Kecamatan Pasimasunggu				Indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan Pasimasunggu	33,89					68		73		76		76		
	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan pasimasunggu			Nilai Sakip Kecamatan Pasimasunggu	0					70		75		85		85		
				Laporan Keuangan Kecamatan Pasimasunggu sesuai SAP	0					sesuai		sesuai		sesuai		sesuai		
				Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pasimasunggu	0					75		80		85		85		
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Peningkatan Pelayanan di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan	30					15	19,475,570	10	19,942,789	8	20,418,624	8	78,836,983	KECAMATAN PASIMASUNGGU
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan (%)	100					100	8,000,000	100	8,000,000	99	8,000,000	100	32,000,000	KECAMATAN PASIMASUNGGU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (6)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						K	R p.	K	R p.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(12)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)	
		7.01.02.2.01 .01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	1					1	4,000,000	1	4,000,000	1	4,000,000	4	16,000,000	KECAMATAN PASIMASUNG GU
		7.01.02.2.01 .02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	1					1	4,000,000	1	4,000,000	1	4,000,000	5	16,000,000	KECAMATAN PASIMASUNG GU
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Urusan pemerintahan yang diselenggarakan (%)	100					100	3,468,752	100	4,000,000	100	4,000,000	95	15,468,752	KECAMATAN PASIMASUNG GU
		7.01.02.2.02 .03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan (Laporan)	1					1	3,468,752	1	4,000,000	1	4,000,000	5	15,468,752	KECAMATAN PASIMASUNG GU
		7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Sarana	100					100	4,000,000	100	4,000,000	100	4,000,000	100	16,000,000	KECAMATAN PASIMASUNG GU
		7.01.02.2.03 .01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	1					1	4,000,000	1	4,000,000	1	4,000,000	4	16,000,000	KECAMATAN PASIMASUNG GU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	R p.	K	R p.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	100					100	4,006,818	100	3,942,789	100	4,418,624	100	15,368,231	KECAMATAN PASIMASUNGU
		7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	1					1	2,006,818	1	1,174,912	1	1,846,105	4	6,027,835	KECAMATAN PASIMASUNGU
		7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	0					1	2,000,000	1	2,767,877	1	2,572,519	4	9,340,396	KECAMATAN PASIMASUNGU
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja	50,91					70,53	2,139,690,139	71,51	2,191,021,305	72,31	2,243,299,073	72,31	10,782,851,514	KECAMATAN PASIMASUNGU
				Persentase Capaian Kinerja Keuangan	79,35					88		91		95		95		
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100					100	14,000,000	100	16,500,000	100	16,500,006	100	75,000,006	KECAMATAN PASIMASUNGU
		0.00.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3					2	1,500,000	2	2,000,000	3	2,000,000	11	8,500,000	KECAMATAN PASIMASUNGU
		0.00.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1					1	3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	5	14,000,000	KECAMATAN PASIMASUNGU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (6)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						K	R p.	K	R p.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)						
		0.00.01.2.01 .03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1					1	2,500,000	1	3,000,000	1	3,000,006	5	13,500,006	KECAMATAN PASIMASUNG GU
		0.00.01.2.01 .04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1					1	3,000,000	1	3,500,000	1	3,500,000	5	15,000,000	KECAMATAN PASIMASUNG GU
		0.00.01.2.01 .05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1					1	2,000,000	1	2,500,000	1	2,500,000	5	12,000,000	KECAMATAN PASIMASUNG GU
		0.00.01.2.01 .06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1					1	2,000,000	1	2,500,000	1	2,500,000	5	12,000,000	KECAMATAN PASIMASUNG GU
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100					100	1,629,429, 851	100	1,630,412, 417	100	1,635,147, 791	100	8,212,034,5 88	KECAMATAN PASIMASUNG GU
		0.00.01.2.02 .01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	15					15	1,619,929, 851	15	1,625,912, 417	15	1,631,647, 791	75	8,186,534,5 88	KECAMATAN PASIMASUNG GU
		0.00.01.2.02 .02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1					1	1,500,000	1	1,500,000	1	1,500,000	5	7,500,000	KECAMATAN PASIMASUNG GU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (6)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(12)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		
		0.00.01.2.02 .05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1					1	2,000,000	1	1,000,000	1	500,000	5	5,000,000	KECAMATAN PASIMASUNG GU
		0.00.01.2.02 .06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1					1	1,000,000	1	1,000,000	1	500,000	4	3,000,000	KECAMATAN PASIMASUNG GU
		0.00.01.2.02 .07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD (Laporan)	4					4	5,000,000	4	1,000,000	4	1,000,000	20	10,000,000	KECAMATAN PASIMASUNG GU
		7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi Barang Milik Daerah (%)	100					100	10,000,000	100	10,000,000	100	10,000,000	100	42,000,000	KECAMATAN PASIMASUNG GU
		0.00.01.2.03 .01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1					1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	5	8,000,000	KECAMATAN PASIMASUNG GU
		0.00.01.2.03 .03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	1					1	3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	5	12,000,000	KECAMATAN PASIMASUNG GU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	R p.	K	R p.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)		
		0.00.01.2.03 .05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1					1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	5	22,000,000	KECAMATAN PASIMASUNG GU
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen Administrasi kepegawaian (%)	100					100	35,000,000	100	35,000,000	100	55,000,000	100	175,000,000	KECAMATAN PASIMASUNG GU
		0.00.01.2.05 .02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapannya (Paket)	1					0	0	0	0	1	20,000,000	2	35,000,000	KECAMATAN PASIMASUNG GU
		0.00.01.2.05 .04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1					1	2,500,000	1	2,500,000	1	2,500,000	4	10,000,000	KECAMATAN PASIMASUNG GU
		0.00.01.2.05 .05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1					1	2,500,000	1	2,500,000	1	2,500,000	4	10,000,000	KECAMATAN PASIMASUNG GU
		0.00.01.2.05 .09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1					1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	5	120,000,000	KECAMATAN PASIMASUNG GU
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perkantoran (%)	100					100	119,260,288	100	120,108,888	100	135,651,276	100	563,816,920	KECAMATAN PASIMASUNG GU
		0.00.01.2.06 .01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0					1	700,000	1	700,000	1	700,000	4	2,800,000	KECAMATAN PASIMASUNG GU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	R p.	K	R p.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)
		0.00.01.2.06 .02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0					2	7,000,000	2	7,000,000	2	7,000,000	8	28,000,000	KECAMATAN PASIMASUNG GU
		0.00.01.2.06 .04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2					4	10,030,144	4	10,454,444	4	11,225,638	18	40,758,460	KECAMATAN PASIMASUNG GU
		0.00.01.2.06 .05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2					2	10,030,144	2	10,454,444	2	11,225,638	10	40,758,460	KECAMATAN PASIMASUNG GU
		0.00.01.2.06 .06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	4					4	4,500,000	4	4,500,000	4	4,500,000	20	20,500,000	KECAMATAN PASIMASUNG GU
		0.00.01.2.06 .08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	0					1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	4	8,000,000	KECAMATAN PASIMASUNG GU
		0.00.01.2.06 .09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	500					400	85,000,000	400	85,000,000	400	99,000,000	2000	423,000,000	KECAMATAN PASIMASUNG GU
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan BMD (%)	100					100	25,000,000	100	49,000,000	100	51,000,000	99	175,000,000	KECAMATAN PASIMASUNG GU
		0.00.01.2.07 .02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0					0	0	1	20,000,000	1	22,000,000	2	42,000,000	KECAMATAN PASIMASUNG GU
		0.00.01.2.07 .05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0					4	5,000,000	4	4,000,000	4	4,000,000	20	23,000,000	KECAMATAN PASIMASUNG GU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab	
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						(6)		(7)		(8)		(9)		(10)				(11)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	R p.	K	R p.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)
		0.00.01.2.07 .06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3					2	20,000,000	2	25,000,000	2	25,000,000	9	110,000,000	KECAMATAN PASIMASUNG GU
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang perkantoran (%)	100					100	225,500,00 0	100	244,500,00 0	100	250,000,00 0	100	1,145,500,0 00	KECAMATAN PASIMASUNG GU
		0.00.01.2.08 .01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0					12	2,500,000	12	2,500,000	12	2,500,000	48	10,000,000	KECAMATAN PASIMASUNG GU
		0.00.01.2.08 .02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12					12	8,000,000	12	8,000,000	12	8,000,000	48	32,000,000	KECAMATAN PASIMASUNG GU
		0.00.01.2.08 .04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12					12	215,000,00 0	12	234,000,00 0	12	239,500,00 0	60	1,103,500,0 00	KECAMATAN PASIMASUNG GU
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerh (%)	100					100	81,500,000	100	85,500,000	100	90,000,000	100	394,500,000	KECAMATAN PASIMASUNG GU
		0.00.01.2.09 .02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	10					9	71,000,000	9	79,000,000	9	80,000,000	45	359,000,000	KECAMATAN PASIMASUNG GU
		0.00.01.2.09 .06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4					6	7,500,000	4	3,500,000	4	5,000,000	16	18,500,000	KECAMATAN PASIMASUNG GU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (6)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(12)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)			
		0.00.01.2.09 .10	Pemeliharaan/Rehabi- litasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit- asi (Unit)	4					4	3,000,000	4	3,000,000	4	5,000,000	20	17,000,000	KECAMATAN PASIMASUNG GU
Meningkatkan kapasitas dan fasilitas perdesaan Kecamatan Pasimasunggu				Indeks Desa Membangun Kecamatan Pasimasunggu	0					0,700 0		0,715 0		0,730 0		0,730 0		
	Meningkatn- ya Kualitas Pemberdaya- an Masyarakat Desa			Persentase Peningkatan Fungsi Lembaga Desa yang Dikoordinasikan	0					70		71		73		73		
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan	100					100	10,390,627	100	10,639,898	100	10,893,766	100	52,061,191	KECAMATAN PASIMASUNG GU
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dikoordinasikan	100					100	10,390,627	100	10,639,898	100	10,893,766	100	52,061,191	KECAMATAN PASIMASUNG GU
		7.01.03.2.01 .01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7					7	2,500,000	7	2,500,000	7	3,000,000	35	13,500,000	KECAMATAN PASIMASUNG GU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	R p.	K	R p.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)
		7.01.03.2.01 .02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	1					1	3,500,000	1	3,500,000	1	4,000,000	5	18,000,000	KECAMATAN PASIMASUNG GU
		7.01.03.2.01 .03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1					1	4,390,627	1	4,639,898	1	3,893,766	5	20,561,191	KECAMATAN PASIMASUNG GU
Meningkatkan upaya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dengan mengaktualisasi kan pada kehidupan sosial di Kecamatan Pasimasunggu				Indeks Ketahanan Sosial Kecamatan Pasimasunggu	0					0,710 0		0,715 0		0,715 0		0,715 0		
	Meningkatn ya tatanan kehidupan sosial masyarakat			Tingkat solidaritas sosial di Kecamatan	0					71		71,5		71,5		71,5		
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus Kriminalitas di tingkat kecamatan	1					1	12,300,360	1	12,595,446	1	12,895,973	1	49,791,779	KECAMATAN PASIMASUNG GU
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)	75					90	6,000,000	95	6,000,000	100	6,000,000	100	24,000,000	KECAMATAN PASIMASUNG GU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (6)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)	
		7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12				12	6,000,000	12	6,000,000	12	6,000,000	48	24,000,000	KECAMATAN PASIMASUNGGU	
		7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (%)	100				100	6,300,360	100	6,595,446	100	6,895,973	100	25,791,779	KECAMATAN PASIMASUNGGU	
		7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	12				12	6,300,360	12	6,595,446	12	6,895,973	48	25,791,779	KECAMATAN PASIMASUNGGU	
Meningkatkan kapasitas kelembagaan keagamaan di Kecamatan Pasimasunggu				Indeks Kesalehan Sosial Kecamatan Pasimasunggu	0				67,30		70		75		75			
	Meningkatnya toleransi kehidupan sosial kemasyarakatan di Kecamatan Pasimasunggu			Tingkat toleransi di Kecamatan	0				67		70		75		75			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (6)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (12)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab (13)
						Tahun-1 (2022) (7)		Tahun-2 (2023) (8)		Tahun-3 (2024) (9)		Tahun-4 (2025) (10)		Tahun-5 (2026) (11)				
						K	R p.	K	R p.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Konflik Sosial dan Keagamaan di tingkat kecamatan	0					0	31,171,880	0	31,919,693	0	32,681,297	0	156,183,570	KECAMATAN PASIMASUNG GU
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang di selenggarakan (%)	75					90	31,171,880	95	31,919,693	100	32,681,297	100	156,183,570	KECAMATAN PASIMASUNG GU
		7.01.05.2.01 .01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	300					300	25,687,499	300	26,488,082	300	27,284,987	1500	129,351,048	KECAMATAN PASIMASUNG GU
		7.01.05.2.01 .04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,Regional, dan Nasional (Orang)	50					50	5,484,381	50	5,431,611	50	5,396,310	250	26,832,522	KECAMATAN PASIMASUNG GU
Meningkatkan kapasitas dan fasilitas perdesaan				Indeks Desa Membangun Kecamatan Pasimasunggu	0					0,700 0	2,245,829, 536	0,715 0	2,299,706, 986	0,730 0	2,354,577, 994	0,730 0	11,252,503, 113	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (6)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						K	R p.	K	R p.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(12)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	R p.	K	R p.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(12)		(13)	
Kecamatan Pasimasunggu																		
	Meningkany a Kualitas Pemerintah n Desa			Persentase Urusan Pemerintahan Desa yang Difasilitasi	0					100	2,245,829, 536	100	2,299,706, 986	100	2,354,577, 994	100	11,252,503, 113	
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Program pemerintahan desa yang mendukung program pemerintah	40					60	32,800,960	65	33,587,855	70	34,389,261	70	132,778,076	KECAMATAN PASIMASUNG GU
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan Pengawasan yang difasilitasi, direkomendasi, dikoordinasikan (%)	50					80	32,800,960	90	33,587,855	100	34,389,261	100	132,778,076	KECAMATAN PASIMASUNG GU
		7.01.06.2.01 .03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan PendayagunaanAset Desa (Dokumen)	1					1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	4	8,000,000	KECAMATAN PASIMASUNG GU
		7.01.06.2.01 .05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangkaPelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	1					1	2,000,000	1	2,500,000	1	1,500,000	4	7,000,000	KECAMATAN PASIMASUNG GU
		7.01.06.2.01 .06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangkaPelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	0					0	0	0	0	1	700,000	2	1,700,000	KECAMATAN PASIMASUNG GU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab	
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)					
						(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)			(12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	R p.	K	R p.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)	
		7.01.06.2.01 .09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan PembangunanDesa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan PembangunanDesa (Dokumen)	1					1	2,000,000	1	2,500,000	1	1,500,000	4	7,500,000	KECAMATAN PASIMASUNG GU	
		7.01.06.2.01 .13	Fasilitasi Penyusunan PerencanaanPembang unan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangkaPerencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	1					1	6,800,960	1	5,587,855	1	6,689,261	4	26,578,076	KECAMATAN PASIMASUNG GU	
		7.01.06.2.01 .16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangkaProgram dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)	1					1	10,000,000	1	10,500,000	1	11,000,000	4	41,000,000	KECAMATAN PASIMASUNG GU	
		7.01.06.2.01 .18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di WilayahKecamatan (Laporan)	1					1	10,000,000	1	10,500,000	1	11,000,000	4	41,000,000	KECAMATAN PASIMASUNG GU	
Total												2,245,829, 536		2,299,706, 986		2,354,577, 994		11,252,503, 113	



Tabel. 6.4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Program / Kegiatan	Volume	Tahun Pelaksanaan					Detail Lokasi	Pagu Anggaran (Rp.)	Sumber Pendanaan	Keterangan
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	Pembangunan Jaring Diam Ramah Lingkungan (JADIRAL) / set net	1 km ²		2023				Desa Tanamalala	24 M	APBN	Kelengkapan Dokumen Perencanaan dokumen lingkungan kesiapan lahan dokumen terkait lainnya bagi program dan kegiatan fisik
2	Peningkatan produksi KOPRA; pelatihan dan pembuatan oven pemanggang	40 ton		2023	2024			Desa Maminasa	3 M	APBN / APBD Provinsi	
3	Pengawasan Wilayah Perbatasan		2022	2023	2024	2025	2026	Kecamatan Pasimasunggu	1 M	APBD Provinsi	
4	Pembinaan UMKM	50 org	2022	2023	2024	2025	2026	Kecamatan Pasimasunggu	2 M	APBD Provinsi / CSR	



BAB VII

KINERJA

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021 - 2026, maka Kecamatan Pasimasunggu menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021 - 2026. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Kecamatan Pasimasunggu dengan Bupati dan Wakil Bupati, dan Kecamatan Pasimasunggu akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen LAKIP tahunan.

Sasaran yang akan dikerjakan oleh Kecamatan Pasimasunggu dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan 2021-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang transparan dan akuntabilitas.
2. Meningkatnya profesionalisme aparatur daerah dalam memberikan pelayanan prima pada masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan umum.
3. Menguatnya kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan sosial daerah.
4. Meningkatnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak.
5. Terwujudnya keberhasilan otonomi daerah yang seimbang yang didukung stakeholders (pemangku kepentingan) dalam mempercepat kesejahteraan rakyat.
6. Terlaksananya peletakan landasan untuk mendukung terwujudnya visi dan misi **“KEPULAUAN SELAYAR SEBAGAI BANDAR MARITIM KAWASAN INDONESIA TIMUR”**.



TC.28

Indikator Kinerja Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026 (mengacu pada tujuan dan sasaran renstra)

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
		Tahun 2020	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Indeks Kepuasan Masyarakat	66,68 %	70%	72%	75%	80%	85%	85%
	Nilai SAKIP Kecamatan	58,85	60.2	65.2	70.2	75.5	80.0	80.0
	Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	% Kebijakan Pembangunan seluruh urusan yang sinkron, harmonis, selaras maupun antar tingkat pemerintahan diwilayah kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	%Penduduk yang mampu mengakses layanan seluruh urusan pemerintahan secara mudah, layak, dan terjangkau di wilayah kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

TC.28

Indikator Kinerja Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026 (tujuan dan sasaran RPJMD)

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 1 2021	Tahun 2 2022	Tahun 3 2023	Tahun 4 2024	Tahun 5 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Angka Kemiskinan / Jumlah KK		15%					
2	Angka Pengangguran / Tenaga Kerja		30%					
3	Persentase Balita Gizi Buruk		0%					
4	Rata2 Jumlah Kelompok Binaan PKK		18					
5	Jumlah Klub Olah Raga		18					
6	Kepemilikan KTP		100%					
7	Ratio Pasangan Berakte Nikah		100%					
8	Kepemilikan Akte Kelahiran / 100 Penduduk		100%					
9	Cakupan Peserta KB Aktif / KK		65%					
10	Ratio Absektor KB Baru / KK		65%					
11	Jumlah Grup Kesenian		18					
12	Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya		2					
13	Jumlah Organisasi Pemuda		18					
14	Persentase Penanganan Gangguan K3 Masyarakat		100%					

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 1 2021	Tahun 2 2022	Tahun 3 2023	Tahun 4 2024	Tahun 5 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Jumlah Poskamling Perjumlah Desa/Kelurahan		18/6 Desa					
16	Angka Kriminalitas		1%					
17	Pembinaan Dan Fasilitasi Pemantauan Ormas Dan LSM		100%					
18	Penegakan Perda		100%					
19	Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Sektor Perikanan		50%					
20	Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Sektor Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan		50%					
21	Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Sektor Pendidikan		70%					
22	Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Sektor Pariwisata		50%					
23	Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Sektor Pekerjaan Umum		80%					



BAB V PENUTUP

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Pasimasunggu sebagai salah satu unit kerja yang strategis dan menunjang pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, maka rencana strategis Kecamatan Pasimasunggu merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan yang direncanakan kurung tahun 2021 – 2026.

Visi Kecamatan Pasimasunggu sebagai dasar pertimbangan dengan misi yang tercermin dalam tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sampai dengan tahun 2026, serta dapat dijadikan acuan kebijakan teknis oleh seluruh Aparatur Kecamatan dan desa/kelurahan, serta masyarakat di Kecamatan Pasimasunggu. Rencana strategis Kecamatan Pasimasunggu akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh aparatur dan masyarakat serta adanya sinergitas, tanggung jawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa. Penting untuk diketahui bahwa berhasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya, yang tidak jarang memerlukan *political will* pimpinan organisasi.

Demikian semoga rencana strategis Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar sampai dengan tahun 2026 dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kecamatan Pasimasunggu.

Pasimasunggu, Agustus 2023

Kepala Kecamatan Pasimasunggu,




NUR MAWING, S.Sos.,M.Si
Np. 196611021991111002